

**“PEREMPUAN DAN POLITIK: Studi Terkait Kegagalan Perempuan  
dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Politik, fakultas ushuluddin, filsafat, dan Politik

UIN Alauddin Makassar

Oleh

**HATIRA**

**NIM : 30600117075**

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hatira

Nim : 30600117075

Tempat/Tgl Lahir : Masamba, 28 Agustus 1999

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik

Alamat : Jln Poros Malangke

Judul : “Perempuan dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya tulisan sendiri. Jika dikemudian hari bukti bahwa karya tulis ini merupakan duplikan, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa, 02 Agustus 2021

Penulis

Hatira  
30600117075

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *Perempuan dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara* disusun Hatira, NIM: 30600117075, mahasiswa Prodi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 19 2021 M, bertepatan dengan 9 Zulhijah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 19 Juli 2021 M  
9 Zulhijah 1442

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Darmawati H, S.Ag.M.HI.
Sekretaris	: Nur Utaminingsih, S.IP, M.Si
Munaqasy I	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si
Munaqasy II	: Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S.Ag, MA
Pembimbing I	: Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.
Pembimbing II	: H. Febrianto Syam, S.IP, M.IP.

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Alauddin Makassar.

Dr. Muhon, S. Ag., M. T. S.  
NIP. 197111251997031001

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman kecerdasan sehingga kita bisa membedakan antara yang haq dan bathil. Berkat Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang maksimal, setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar pernyataan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Sejalan dengan ini, penulis memilih judul (*“Perempuan dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”*) semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terimakasih yang paling tulus kepada Ayahanda **Sarimuddin** dan Ibunda **Mariani** serta kedua saudara saya **Sarlina** dan **Selpiah** yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui

perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat.

Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Bapak Dr. Muhsin Mahfudz selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik serta para Wakil Dekan beserta seluruh staf fakultas.
3. Bapak Syahrir Karim, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik serta selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Utaminingsih, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Bapak Febrianto Syam, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang banyak memberikan energi positif bagi penulis dalam pengerjaan tugas akhir.

5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.
6. Teman-teman Ilmu Politik 2 angkatan 2017 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu oleh penulis yang senantiasa kebersamaan dalam setiap proses menuju penyelesaian akhir

Sungguh setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Samata – Gowa, 17 Juni 2021

Penulis

Hatira  
Nim: 30600117075

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Tinjauan Karya Terdahulu .....	9
BAB II LANDASAN TEORITIK .....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Gender .....	14
a. Budaya Patriarki.....	14
i. Hirarki dalam sistem patriarki.....	19
ii. Dualism nilai: Ideologi gender yang bersifat biner.....	20
iii. Logika dominasi.....	21
2. Konsep Strategi .....	22
a. Hubungan internal.....	23
b. Hubungan eksternal .....	24
3. Rational Choice.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	29

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Sumber Data Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara.....	38
2. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	40
3. Kondisi Politik, Hukum Dan Keamanan .....	45
B. Kondisi Politik Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
C. Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Luwu Utara.....	53
a. Faktor Internal.....	57
1. Modal Sosial .....	57
2. Modal Politik .....	60
3. Modal Ekonomi .....	62
b. Faktor Eksternal.....	64
1. Kampanye .....	64
2. Tim sukses .....	65
3. Wajah baru caleg.....	66
4. Perolehan suara partai dan suara individu.....	67
D. Pandangan Masyarakat tentang Keberadaan Perempuan di Parlemen.....	68
1. Hirarki dalam Perpolitikan di Kabupaten Luwu Utara.....	69
2. Dualisme Nilai dalam Perpolitikan di Kabupaten Luwu Utara...	71
3. Logika Dominasi dalam Perpolitikan di Kabupaten Luwu Utara	72
BAB V PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74



B. Saran .....	75
DASFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI .....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	88



## ABSTRAK

**Nama : Hatira**  
**Nim : 30600117075**  
**Judul : Perempuan dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara**

---

Skripsi ini membahas tentang perempuan dan politik yang memfokuskan kajian pada kegagalan perempuan dalam pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara serta bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan perempuan di parlemen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan penelusuran data *online*. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara serta bagaimana pandangan masyarakat terkait keberadaan perempuan di Parlemen. masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya masih banyak yang berpandangan patriarki. Banyak yang beranggapan bahwa apa yang bisa dilakukan perempuan ketika mereka menjadi wakil rakyat, karna menurut mereka perempuan hanya bisa mengurus wilayah-wilayah domestik saja. Perempuan dianggap menanggung beban ganda ketika harus bekerja di luar rumah apalagi menjadi wakil rakyat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pileg 2019 yakni faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal meliputi Modal Sosial, Modal Ekonomi dan Modal Politik. Sedangkan faktor Eksternal meliputi Kampanye, Tim Sukses, Wajah Baru Caleg 2019 serta Perolehan Suara Partai dan Individu.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kiprah perempuan dalam politik menjadi bahasan yang cukup penting belakangan ini. Banyak wilayah yang kemudian dipimpin oleh perempuan. Belakangan juga muncul aturan kuota 30% perempuan yang membuka peluang bagi perempuan untuk duduk di parlemen. Aturan kuota 30% perempuan di kepengurusan partai politik dan daftar caleg diyakini sebagai alat efektif untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Hal tersebut agar perempuan dapat mengambil peran signifikan dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak bias gender. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD pada beberapa pasalnya mengharuskan kuota 30% perempuan yang merupakan lanjutan dari UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta UU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Aturan kuota 30% ini berdampak pada beberapa Partai Politik yang dicoret di sejumlah daerah pilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak memenuhi kuota 30% perempuan di daftar calegnya. Aturan ini menjadi arus besar wacana tentang perempuan di ruang publik. Jika sebelumnya perempuan

di anggap sebagai pihak yang hanya mengurus ruang domestik saja, kini dengan adanya aturan tersebut telah mendorong perempuan untuk keluar mengurus hal-hal yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat.

Sebagai Negara demokrasi, sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok terwakili merupakan suatu tuntutan besar. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Secara kapasitas perempuan juga memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan sebuah negara, seperti pepatah yang mengatakan bahwa perempuan merupakan tiang negara. Selain itu, keberadaan perempuan di parlemen merupakan metode artikulasi kepentingan dan kebutuhan perempuan diluar parlemen melalui kebijakan-kebijakan strategis. Hal tersebut juga sebagai wujud rekonstruksi kesadaran masyarakat yang masih berpadangangan Patriarki.

Meski demikian, adanya aturan kuota 30% ini, ternyata tidak menjamin perempuan untuk lolos di parlemen. Secara regulasi memang disebutkan 30% namun faktanya jumlah perempuan yang duduk di parlemen masih di bawah kuota. Saat ini keadilan dan kesetaraan dapat dikatakan belum tercapai diantara perbedaan jenis kelamin tersebut, khususnya pada perempuan. Sehingga isu perempuan di ruang publik menjadi hal yang penting dalam perpolitikan Indonesia saat ini.

Posisi perempuan di ruang publik semakin termarginalisasi. Namun setelah masuknya era reformasi, perempuan mendapat perhatian banyak. Tahun ke tahun jumlah perempuan yang mencalonkan menjadi anggota parlemen semakin banyak, hanya saja seringkali perempuan hanya sampai pada masa pemilihan saja

tidak sampai lolos kedalam parlemen. Budaya patriarki yang sejak lama dikenal oleh masyarakat dinilai menjadi salah satu alasan gagalnya perempuan pada pemilu-pemilu yang dilaksanakan. Banyak daerah yang mencatat kegagalan perempuan pada pemilu yang berlangsung salah satunya yang terjadi di Kabupaten Gresik. Caleg perempuan PPP tersebut gagal dalam pemilihan legislatif di daerah pilihan (DAPIL) 1. Faktor yang paling umum menjadi alasan gagalnya perempuan di pemilihan umum yakni status mereka yang sampai saat ini masih dianggap tidak bisa menduduki wilayah-wilayah sentral suatu wilayah. Perempuan dianggap tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, karena perempuan diidentikkan dengan makhluk yang perasa, makhluk yang lebih suka menggunakan perasaan dibanding dengan logika.

Dalam beberapa kasus, keberadaan perempuan dalam wilayah-wilayah publik sering kali di bantahkan dengan pemahaman-pemahaman tentang larangan agama tentang kepemimpinan perempuan. Namun, jika dilihat lebih jauh, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan perempuan dalam berpolitik yakni QS Al-Taubah /9:71 yang berbunyi:

عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنَاسِكَاتِ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۚ إِنَّ

Terjemahan: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari

yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pikiran-pikiran seperti ini yang terus berulang dimasyarakat sehingga membuat perempuan dinilai tidak cukup baik untuk memimpin. Perempuan dianggap akan menanggung beban ganda jika mereka juga terjun ke wilayah publik. Kasus lain tentang gagalnya perempuan mengisi ruang-ruang publik juga terjadi di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Pandangan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki lagi-lagi menjadi penyebab dukungan yang kurang maksimal terhadap calon anggota legislatif perempuan. Selain itu, meskipun telah mendapatkan dukungan keluarga, dukungan dana dan dukungan partai politik, tetap tidak membuat caleg tersebut lolos dalam pemilu legislatif. Kurangnya kualitas atau kemampuan perempuan menjadi faktor lain dalam kegagalannya lolos ke parlemen.

Hingga saat ini, perempuan masih menjadi momok yang terus diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana kemudian perempuan itu terlepas dari budaya-budaya patriarki yang sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat. Namun ada satu hal yang menarik yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Jika sebelumnya perempuan gagal dalam pemilu legislatif karena faktor budaya patriarki, beda halnya dengan di Kabupaten Luwu Utara yang dipimpin langsung oleh seorang Bupati perempuan.

Wilayah yang mekar di tahun 1999 itu, mencatat sejarah yang memberikan angin segar bagi kaum perempuan. Wilayah yang luasnya sekitar 7,502.58 km<sup>2</sup> itu di pimpin oleh seorang perempuan dan menjadi wilayah pertama di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh perempuan. Dengan adanya pencapaian tersebut, memberikan warna baru di dunia perpolitikan khususnya di Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang notabene masyarakatnya masih banyak menjunjung nilai-nilai kebudayaan.

Sebagai wilayah yang dipimpin oleh perempuan, harapan agar keikutsertaan perempuan pada pemilihan legislative nantinya bisa lebih besar. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Pada pemilihan legislatif yang dilaksanakan tahun 2019 kemarin, tidak ada satu pun caleg perempuan yang lolos ke kursi parlemen. Meskipun dalam daftar caleg setiap parpol yang mengikuti kontestasi pileg pada tahun 2019 sudah terpenuhi, namun keterwakilan perempuan di parlemen terhenti langkahnya pada saat pemilihan. Wilayah yang dipimpin oleh perempuan itu harus menunggu 5 tahun lagi untuk mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif tingkat daerah. Setelah mencatat sejarah pemimpin perempuan pertama di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara juga mencatat sejarah buruk bagi calon legislatif perempuan. Dipimpin oleh seorang perempuan ternyata tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan perempuan di kursi parlemen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara menetapkan 35 caleg terpilih dari 4 dapil dengan jumlah 375 caleg. Dari jumlah yang telah ditetapkan, tidak ada nama caleg perempuan yang disebutkan. Pada periode

sebelumnya juga tercatat hanya ada dua nama calon anggota legislatif perempuan yang kemudian terpilih sebagai anggota parlemen, yakni Rafika Said dan Andi Nirwana Gazaling. Hal ini menunjukkan kemerosotan yang cukup signifikan dari caleg perempuan yang tidak mampu bersaing dengan caleg laki-laki. Terlebih lagi dua anggota legislatif perempuan yang terpilih pada priode sebelumnya juga kembali mencalonkan pada pileg 2019, namun perolehan suaranya lebih rendah dibanding caleg lainnya.

Meskipun sebagai wilayah yang dipimpin oleh seorang perempuan, tidak berarti keberadaan perempuan di parlemennya juga terpenuhi. Kecenderungan pandangan negatif terhadap perempuan bisa saja menjadi penyebab rendahnya keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif. Perempuan seringkali dijustifikasi sebagai kaum yang lemah baik secara biologis maupun emosional dan untuk itu tidak cocok memasuki peran sentral. Meski salah seorang perempuan telah mematahkan perspektif patriarkis tersebut dengan menjadi Bupati, namun hal ini tidak berlaku pada pemilihan legislatif, khususnya pada pemilihan tahun 2019 yang tidak meloloskan satu pun perempuan ke kursi parlemen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PEREMPUAN DAN POLITIK: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:



1. Apa yang mempengaruhi kegagalan caleg perempuan pada pemilu legislative 2019 di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kehadiran perempuan di parlemen?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara.
2. Menganalisis pandangan publik terkait kehadiran perempuan di parlemen.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **a. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan rujukan kepada calon legislatif khususnya perempuan untuk memahami peran penting perempuan dalam parlemen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan yang kalah dipemilihan sehingga mereka dapat berbenah diri.

#### **b. Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai perempuan dan politik khususnya kegagalan perempuan di parlemen. Serta, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan memperkaya hasanah pemikiran

politik dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam kajian ilmu politik.

#### **E. TINJAUAN KARYA TERDAHULU**

Bahwa setelah penulis menelusuri beberapa referensi yang ada, maka penulis menyebutkan diantaranya pernah dilakukan namun tidak serupa yaitu:

1. Tulisan Yahya Ahmadi yang berjudul ***“Pandangan Masyarakat pada Calon Anggota Legislatif (CALEG) Perempuan PPP di Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kabupaten Gresik”***. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa caleg perempuan dapil 1 Kabupaten Gresik parpol PPP dalam langkahnya mengikuti konstestasi politik mendapat dukungan yang mereka peroleh dari sebagian masyarakat, keluarga, saudara dan teman serta partai PPP sendiri berbentuk dukungan motivasi, dana kampanye, bantuan sosialisasi dari mulut kemulut, alat atau fasilitas sosialisasi/kampanye. Selain itu, caleg perempuan juga mendapatkan beberapa kendala dalam prosesnya menjadi caleg. Bentuk kendala yang dihadapi umumnya berupa pandangan miring dari masyarakat dan relasi cenderung bias gender. Kendala tersebut berbentuk: marginalisasi, subordinasi, *stereotype* dan beban ganda. Kendala lainnya yaitu kurang optimal dalam sosialisasi dan pemahaman sebagian caleg tentang kodrat mereka sebagai perempuan yang masih bias gender, serta pandangan sebagian masyarakat yang cenderung suka dengan *money politic*. Skripsi ini sebagai rujukan dikarenakan kemiripan pada objek penelitian yakni terkait perempuan dan politik, dan adapun yang membedakannya yakni

penulis pada skripsi rujukan meneliti tentang pandangan masyarakat terkait caleg perempuan di Kabupaten Gresik, Sementara itu, dalam penelitian ini mengambil focus pada Kegagalan perempuan dalam pemilihan legislative di Kabupaten Luwu Utara.

2. Tulisan Riris Resita Simamora yang berjudul ***“Perempuan dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)***. Dalam hasil penelitian penulis menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya eksistensi perempuan dalam politik di DPRD Lampung Timur adalah persoalan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Tidak banyak perempuan yang mengetahui seluk beluk tentang dunia politik. Selain itu, nomor urut juga sangat menentukan keterpilihan seorang caleg. Perempuan selalu ditempatkan pada nomor urut bawah, sehingga kuota keterpilihan pun semakin kecil sehingga terjadi penurunan jumlah keterwakilan anggota legislative perempuan di Kabupaten Lampung timur pada tahun 2009-2014 berjumlah 13% dan 2014-2019 ada 10%. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian kali ini, peneliti mencoba mengangkat tema kegagalan perempuan dalam pemilihan legislative di Kabupaten Luwu Utara yang tidak meloloskan satu pun perempuan di kursi parlemen meskipun dipimpin oleh seorang Bupati perempuan.
3. Skripsi tahun 2015 ***“Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)*** oleh: Siti Nasripah, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang. Dalam karya tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pandangan masyarakat di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara masih dipengaruhi oleh budaya patriarkhi, akhirnya menjadikan dukungan dari masyarakat yang kurang maksimal. Meskipun ada dukungan keluarga, dana dan partai politik, namun dukungan tersebut belum mampu membuat caleg perempuan di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara lolos dalam pemilu legislative tingkat kabupaten tahun 2014. Dengan demikian alasan kuat tidak lolosnya caleg perempuan di wilayah tersebut yaitu kuatnya budaya patriarkhi. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan meneliti faktor disamping budaya patriarkhi yang kemudian tidak meloloskan satupun caleg perempuan di Kabupaten Luwu Utara, karena hasil dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa faktor terkuat kegagalan perempuan adalah budaya patriarkhi, sedangkan di Kabupaten Luwu Utara sendiri dipimpin oleh seorang Bupati Perempuan.

4. Jurnal tahun 2014 ***“Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE)*** oleh: Syaifa, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif tersebut menjelaskan bagaimana calon perempuan gagal dalam pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Merangin pada tahun 2013. Menjadi satu-satunya pasangan calon Bupati yang berpasangan dengan perempuan dianggap membawa peluang yang cukup besar melihat jumlah

pemilih perempuan di wilayah tersebut juga lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Namun pasangan calon perempuan ini, yakni Syukur-Fauziah gagal dalam pemilu karena salah satu faktornya yakni isu pemajuan perempuan belum menjadi muatan kampanye yang dianggap krusial. Program pemberdayaan perempuan tampak belum menjadi bagian utama dari keseluruhan visi-misi yang diangkat oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni kasus objek yang berbeda. Jika sebelumnya peneliti meneliti kegagalan perempuan di wilayah sentral atau skala kepala daerah maka penelitian kali ini lebih berfokus pada kegagalan perempuan di wilayah parlemen.

5. Jurnal tahun 2015 **“Analisis Faktor Pendukung Kemenangan Calon Legislatif Perempuan Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan RIAU Tahun 2014”** oleh: Fauzan Azhima, Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif tersebut menjelaskan mengenai beberapa faktor yang bisa mendukung terpilihnya perempuan di Parlemen. Regulasi yang mengharuskan keterlibatan perempuan di daftar calon legislatif tentu saja menjadi kesempatan yang sangat besar bagi perempuan untuk menduduki wilayah-wilayah sentral, kendati demikian tidak jarang banyak perempuan yang gagal menggunakan kesempatan tersebut. Jurnal yang ditulis oleh Fauzan Azhima ini menyebutkan setidaknya ada tiga modalitas

yang dapat mendukung kemenangan calon legislatif. *Pertama*, Modal Sosial. Modal Sosial dapat diukur dari sejauh mana seorang calon legislative membangun hubungan yang cukup baik dengan Masyarakat ketika pelaksanaan sosialisasi kepada pemili agar tercipta suatu jaringan yang cukup besar. *Kedua*, Modal Politik. Modal Politik menjadi sentral bagi semua orang yang bermaksud mengikuti pemilihan umum, baik di dalam tahap pencalonan maupun di dalam tahap pemilihan. *Ketiga*, Modal Ekonomi. Modal Ekonomi seringkali menjadi kekuatan utama seorang calon legislatif dalam rangka mendapatkan suara pemilih. Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah hasil dari pemilihannya. Jika sebelumnya hasil pemilihan mengantarkan perempuan menang ke kursi parlemen, maka pada penelitian ini lebih kepada faktor yang menyebabkan kegagalan perempuan pada pemilihan legislatif.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. TEORI

Teori berasal dari kata: *thea* yang artinya melihat atau memperhatikan. Secara umum teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, dan simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Dalam Miriam budiarjo, pengertian teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.<sup>1</sup>

##### 1. Gender

Gender menjadi persoalan yang sudah cukup lama dalam kajian-kajian ilmu sosial, hukum, keagamaan maupun yang lainnya. Meskipun telah dikaji dalam waktu yang tidak sebentar, memahami gender bukanlah hal yang mudah. Banyak kalangan yang terkadang menafsirkan gender dengan tafsiran yang berbeda. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, meskipun secara etimologis gender berasal dari Bahasa Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’. Yang membedakan antara *sex* dan Gender yaitu *sex* digunakan untuk mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek yang tidak berhubungan dengan biologis manusia. Secara

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.43.

terminologis pula, gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Ekaine Showalter, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.<sup>2</sup> Sementara konstruksi sosial budaya ialah sebuah pandangan bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial merupakan buatan manusia atau sesuatu yang diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.

Istilah gender pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968.<sup>3</sup> Gender bisa dijadikan sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi, terkhusus pada kaum perempuan. Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki terjadi melalui proses yang Panjang, hingga pada akhirnya menjadi budaya di masyarakat dan memunculkan anggapan masyarakat bahwa gender adalah sesuatu yang bersifat kodrati dan biologis yang tidak bisa diubah lagi. Artinya kodrat perempuan dan laki-laki merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi posisi perempuan dan laki-laki di wilayah sosial.

Pada setiap kajian gender, perempuan dianggap sebagai kaum yang banyak dirugikan. Perempuan seringkali dianggap berada jauh di bawah laki-laki. Misalnya saja, perempuan dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan diluar rumah, perempuan hanya bertugas mengurus wilayah domestik saja atau biasa dikenal dengan istilah dapur, sumur dan kasur. Anggapan seperti ini telah lama melekat pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga membuat perempuan terjebak

---

<sup>2</sup> Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*, hlm. 2

<sup>3</sup> Ulfatun Hasanah, Najanah, *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, Vol 12 No3, 2017. Hlm.413



dalam ruang yang dikonstruksi secara sosial sehingga membuat ruang gerak perempuan terbatas. Perbedaan peran gender tersebut kian menguat karena disosialisasikan terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak kecil, laki-laki dan perempuan dibiasakan dengan mainan yang berbeda, laki-laki identik dengan permainan yang menguji kekuatan, sedangkan perempuan diberi mainan yang identik dengan kelembutan. Sehingga dewasa ini, perempuan seringkali dianggap tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi publik karena dianggap makhluk yang perasa.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, persoalan gender di Indonesia dapat dilihat dari aspek ruang dan waktu luas dasar kultur yang berlaku di berbagai lokasi dan waktu tertentu.<sup>4</sup> Sejarah perempuan Indonesia sudah menjadi rahasia umum, sebelum adanya gerakan-gerakan feminisme<sup>5</sup> yang salah satunya di pelopori oleh R.A Kartini, nasib perempuan Indonesia saat itu sangat jauh dari keadaan sekarang. Dahulu diketahui bahwa perempuan di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mengenyam bangku Pendidikan karena dianggap pada akhirnya mereka hanya akan berakhir di dapur juga. Sehingga gender melahirkan sebuah budaya patriarki.

Namun, seiring berjalannya waktu semakin banyak perempuan yang masuk ke ranah publik. Perempuan kini lebih berani keluar dari wilayah domestik ke wilayah politik hal ini disebabkan karena pendidikan perempuan semakin tinggi sehingga kemampuan mereka bisa bersaing dengan laki-laki di sektor

---

<sup>4</sup> Riris Resita Simamora, dalam skripsi *Perempuan dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur, 2019*. Hlm.21

<sup>5</sup> Feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (patriarki) yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional.

publik. Kemauan perempuan untuk terus maju dan berkembang disebabkan karena tuntutan zaman yang kian berubah dan meningkatkan status sosial sehingga perempuan mampu mengurus hal-hal yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat. Hanya saja budaya patriarki yang sejak lama dipahami masyarakat hingga saat ini belum bisa hilang sepenuhnya. Perempuan hingga saat ini masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat jika mengurus hal-hal yang sejak lama dipercayai bahwa hanya laki-laki yang mampu mengerjakannya. Peran perempuan di wilayah publik dianggap tidak akan maksimal karena harus menanggung beban ganda. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak di banding jenis kelamin lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu perilaku yang muncul dari hasil kontraksi sosial dan budaya sehingga memunculkan suatu kebiasaan dan anggapan yang terus berjalan dimasyarakat. Meski demikian, seiring berjalannya waktu banyak bermunculan aktivis-aktivis gender, dimana mereka menuntut adanya kesetaraan gender atau peran antara perempuan dan laki-laki di wilayah sosial. Gender dianggap telah lama membuat perempuan terjebak dalam budaya patriarki sehingga membuat perempuan terkurung dalam batasan-batasan yang dibuat oleh manusia.

a. Budaya Patriarki

Menurut Alfian Rokhmansyah di bukunya yang berjudul *Pengantar dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-

---

<sup>6</sup> Yahya Ahmadi, *Pandangan Masyarakat pada Calon Anggota Legislati (Caleg) Perempuan PPP di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Gresik*. Hlm.34

galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.<sup>7</sup> Laki-laki berperan sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan dianggap hanya memiliki sedikit pengaruh bahkan dianggap tidak memiliki banyak hak dalam ruang-ruang public, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Sejak lama, masyarakat dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas sehingga hal ini menjadi budaya yang hingga saat ini masih sangat sulit untuk dilupakan. Perempuan selalu dititikan pada kelas domor dua, yang hanya bisa mengurus wilayah-wilayah domestik saja. Ini terlihat pada praktek masyarakat pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam Pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.<sup>8</sup>

Budaya patriarki yang masih terus berlangsung hingga saat ini menandakan bahwa laki-laki masih pada posisi atas, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama. Budaya patriarki ini mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Dengan maksud bahwa laki-laki berada pada posisi perempuan sehingga bisa mengendalikan perempuan. Budaya ini tumbuh pada masyarakat sudah sejak lama

---

<sup>7</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, hlm.72

<sup>8</sup> Ibid, hlm.72

sehingga menciptakan mitos-mitos yang hingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang masih mempercayainya. Budaya patriarki juga memandang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi fisiknya atau secara biologis yang kemudian dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki kesetaraan. Perempuan yang tidak memiliki otot dijadikan alasan mengapa masyarakat menempatkan mereka pada posisi yang lemah.

i) Hirarki dalam system patriarki

Penafsiran tentang adanya hirarki berarti: ada satu lebih tinggi dari- misalnya laki-laki yang bekerja di sektor publik dianggap lebih tinggi dari perempuan yang bekerja di sektor domestik. Argument tentang “lebih tinggi” secara ontologis ini biasanya didasarkan pada penafsiran QS al-Nisa/Perempuan (4): 34. Berdasarkan penafsiran tersebut, kaum laki-laki memiliki tugas-tugas besar, seperti sebagai Nabi, ulama, imam, guru sufi, dan lain-lain. Laki-laki pula yang berperan dalam jihad, azan, shalat jum’at, khutbah, takbir, persaksian dan lain-lain. Sedangkan pada diri perempuan tidak punya otoritas untuk itu. Hirarki dan argument superioritas atas perempuan ini, setelah mendapatkan pengesahan teologis, selanjutnya juga muncul kuat dalam keilmuan. Misalnya dalam psikologi dan sosiobiologi. Maka, stereotip perempuan dalam psikologi adalah: pasif, masokis, emosional, penurut dan penyayang. Hirarki di kukuhkan oleh ilmu pengetahuan. Dan sayangnya, sifat yang dilabelkan kepada perempuan tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang berkonotasi negatif, lemah, dan pantas berada di bawah atau lebih rendah posisinya disbanding dengan sifat-sifat yang

selama ini melekat pada laki-laki. Dengan keadaan perempuan yang tidak setara (inequality) dengan laki-laki, jelas perempuan tidak mempunyai kebebasan (freedom) di hadapan laki-laki. Tidak adanya inequal dan freedom ini memang merupakan hal yang logis dari seluruh cara berfikir yang konservatif. Karena dalam hirarki ini, disahkan bahwa laki-laki memang “lebih mulia” di banding perempuan. Perbedaan kesempatan yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan membuat sebagian perempuan lebih sadar akan masalah sosial di sekitarnya.<sup>9</sup>

ii) Dualisme Nilai: Ideologi gender yang bersifat Biner

Perbedaan psikologis yang ada antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan dan biologis keduanya. Ideologi ini diperkuat beberapa pendapat filosofis seperti Immanuel Kant dan Bruno Bettelheim yang menganggap bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki secara fisik maupun psikologis, maka akan sangat wajar sekali bila perempuan dikuasai laki-laki. Bahkan Aristoteles mengatakan bahwa “Wanita adalah pria yang tidak lengkap”. Dari teori ini maka terbentuklah suatu ideologi gender yang bersifat ‘biner’. Laki-laki digambarkan sebagai manusia yang sempurna, rasional, aktif, eksploratif dan agresif sedangkan perempuan adalah manusia lemah, emosional, pasif, submitif dan tergantung. Sehingga, perempuan hanya pantas disertai tugas-tugas yang ada di lingkungannya saja yang tidak terlalu membutuhkan nalar dan sikap eksploratifnya.

---

<sup>9</sup>Sebagaimana dikutip oleh Aisyah Arsyad dari buku Fikih Gender dari Soe Tjen Marching, *Kisah di Balik Pintu: Identitas Perempuan Indonesia: Antara Yang Publik & Privat*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), h.218-219.

Tentang laki-laki dan perempuan Aristoteles juga mendukung adanya dikotomi jiwa-raga dengan anggapan bahwa ketidaksetaraan di antara manusia sebagai sesuatu hal yang alami dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Dia juga berpendapat bahwa dualism hirarki, yakni oposisi kembar mengharuskan adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Jiwa mendominasi perempuan dan seterusnya. Perempuan yang didefinisikan sebagai suatu yang ganjil, menyimpang dari prototipe manusia generic adalah budak-budak dari fungsi tubuh yang pasif dan emosional. Akibatnya perempuan lebih rendah dari laki-laki yang memiliki pikiran aktif dan cakap.<sup>10</sup>

iii) Logika Dominasi

Penindasan terhadap perempuan dan anak bermula dari control budaya terhadap alam yang diproyeksikan pada control laki-laki atas perempuan. Relasi timpang ini dalam proses kehidupan manusia menghasilkan berbagai macam bentuk dominasi atau penguasaan yang memosisikan si kuat atas si lemah. Wacana “Wanita yang lemah” begitu dominan dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini telah diproduksi demikian intensif dalam proses subordinasi Wanita, termasuk oleh kaum feminis. Dominasi dan subordinasi memang merupakan proses penting bahwa hubungan kekuasaan antara laki-laki dan Wanita ditegaskan terus menerus. Namun disini kecenderungan kita menempatkan Wanita sebagai pihak yang ter subordinasi menyebabkan kita kehilangan dimensi lain dan menjelaskan realitas kehidupan Wanita. Dalam struktur yang hegemonik sekalipun, sesungguhnya Wanita melakukan pilihan bagi hidupnya. Wanita bukan

---

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Aisyah Arsyad dari buku Fikih Gender dari Aristoteles, Politics, (*Istanbul: Remzi Publishing House, 1983*), h. 54), Lihat: Gender dan Demokrasi. H. Xxvii

pihak yang menerima begitu saja suatu kenyataan hidup. Struktur yang hegemonic tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang juga tidak hanya melibatkan laki-laki dan Wanita, melainkan juga terkait pada suatu struktur kepentingan. Sehingga pada saat membicarakan dimensi semacam ini sesungguhnya kita mulai membicarakan perspektif, bahwa kita berdiri memandang realitas kehidupan Wanita.<sup>11</sup>

## **2. Konsep strategi**

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat. Kata strategi berasal dari bahasan Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka Panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (George Steiner, Strategic Planning, 1979, Free Press).

Clausewitz (Arifin, 2003-161) berpendapat bahwa pengertian strategi adalah “pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan”. Menurut Mprrisey (Nimmo, 2005: 121), strategi adalah “proses untuk menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan”.<sup>12</sup>

Secara terminologi, strategi dapat diartikan sebagai ilmu tentang taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Oleh Lasswel istilah

---

<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip oleh Aisyah Arsyad dari buku Fikih Gender dari Irwan Abdullah, *Wacana Perempuan*, h.6-8.

<sup>12</sup> Riris Resita Simamora, *Perempuan dalam Politik (Studi Anggota Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)*, 2019.hlm.37



politik tersebut dapat disimpulkan sebagai masalah *who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Artinya, ada usaha dan strategi dalam suatu proses politik “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”.<sup>13</sup> Strategi politik menjadi cara untuk merebut hati konstituen dan membuat mereka memilih calon yang diinginkan. Salah satu bentuk strategi politik yang sering kali digunakan oleh calon anggota legislative yakni strategi komunikasi saat kampanye.

Menurut Lock dan Harris (Firmansah 2009:275) kampanye politik terkait dengan pembentukan *image* politik.<sup>14</sup> Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang hendak dibangun, yaitu internal dan eksternal.

a. *Hubungan Internal*

Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka.<sup>15</sup> Dengan memperkuat hubungan ideologi maka langkah calon legislatif untuk bertarung di pemilu legislatif akan sedikit lebih mudah. Dukungan dari anggota partai politik lainnya menjadi sangat penting karena dapat membantu keterpilihan calon. Dalam partai politik sendiri, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik internal, oleh karena itu setiap caleg membangun hubungan internal terlebih dahulu. Selain itu, partai politik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan

---

<sup>13</sup> Muhatir Hi Hidayat, *Strategi Politik Pemenangan Pasangan Kandidat Vonnie Annake Panambunan-Joppi Lengkong dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015*, 2015, Hlm.2

<sup>14</sup> Bowo Sugiarto, dkk. *Strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah*, Vol 27 No 3, 2015, hlm.145

<sup>15</sup> Bowo Sugiarto, dkk, hlm.145



masyarakat. Dengan demikian langkah ini sebagai langkah awal untuk mengespose calon anggota legislatif.

b. Hubungan Eksternal

Hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan *image* yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat.<sup>16</sup> Media sendiri menjadi faktor utama seseorang bisa meraih kemenangan karena dengan media, calon tersebut bisa mencitrakan dirinya sehingga masyarakat mengetahui dan bersimpati untuk memilihnya. Dalam politik, untuk membangun hubungan eksternal, banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menjadi pemenang. Ada strategi yang positif (sesuai dengan aturan) dan ada juga yang negatif, seperti: *money politic*, *black campaign*, manipulasi suara dan sederet kecurangan lainnya. Untuk kasus *money politic* sendiri saat ini telah menjadi rahasia umum di setiap pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. *maney politic* menjadi ajang bergengsi untuk mendapat suara dari masyarakat sehingga tidak sedikit masyarakat yang selalu menantikan *maney politic* di setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Selain itu, dalam kompetisi politik baik pada pemilu anggota legislatif, pilpres atau pemilu kepala daerah adalah mengangkat sebuah opini dan isu yang menyita perhatian publik dan menimbulkan simapati bagi para pemilih.<sup>17</sup> Ada juga strategi kampanye dengan menempatkan figure atau tokoh di balik partai, idologi atau kepentingan, dan janji yang diusung.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.145

<sup>17</sup> Bowo Sugiarto, dkk. *Strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah*, Vol 27 No 3, 2015, hlm.145-146

Selain strategi kampanye, strategi komunikasi juga menjadi bagian yang penting dalam strategi politik. Dedi Mulyana (2005: 2) mengemukakan bahwa strategi komunikasi adalah cara dan upaya untuk memaksimalkan pesan kepada komunikan dengan cara yang tepat.<sup>18</sup> Dalam hal ini, komunikator harus mampu memainkan peran yang menegdepankan isi pesan yang sederhana dalam menyampaikan ke masyarakat. Sebelum itu, komunikator terlebih dulu harus paham betul bagaimana tipologi masyarakat di daerah pilihannya. Untuk itu, komunikator diharapkan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga dalam prosesnya mampu memuluskan semua isi pesan bisa tersampaikan kepada khalayak tanpa jarak. Beberapa strategi pemenangan juga dapat menerapkan Swot analisis politik. Strategi ini dianggap efisien karena mempertimbangkan beberapa hal dan telah digunakan beberapa kandidat saat pemilu berlangsung. Salah satu contohnya yakni pasangan Muhammad Ramadhan Pomanto dengan Syamsu Rizal pada pemilihan Walikota di Makassar pada tahun 2013. Menurut Rangkuti (2002: 12) dalam bukunya manajemen Swot Analisis menerapkan beberapa langkah yaitu **Strength** adalah upaya menunjukkan dan mengkalkulasi kekuatan dalam mencapai tujuan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nurul Qalbi, *Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pasangan Muhammad Ramadhan Pomanto-Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013*, Vol.1 No.2, 2015, hlm.236

<sup>19</sup> Nurul Qalbi, *Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pasangan Muhammad Ramadhan Pomanto-Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013*, Vol.1 No.2, 2015, hlm.236

### 3. Rational Choice

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kara rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal.<sup>20</sup> Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran yang didasarkan pada sebuah pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan sesuai dengan apa yang akal pikirkan. Rational choice muncul ketika dihadapkan dengan banyaknya pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan.

Buchan (1972) menjelaskan bahwa teori pilihan rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diteapkan pada sector public yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan warga, politisi, dan nelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Sedangkan menurut Homans dalam (Ritzer, 2008) pilihan rasional terkait dengan kalkulasi seseorang dalam berbagai tindakan alternatif yang tersedia baginya.<sup>21</sup>

Teori pilihan rasional berasal dari Ilmu sosiologi. Akan tetapi, dalam pembuatan keputusan dalam suatu negara dilakukan juga oleh individu atau kelompok, korporasi dan aktor lainnya, yang juga menjadi salah satu kajian dari teori pilihan rasional, maka teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan

---

<sup>20</sup> KBBI

<sup>21</sup> Ardina Wulantami, *Pilihan Rasional Keputusan Perempuan Sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga*, (Vol.7 No.1, 2018), hlm.5

fenomena-fenomena yang bersifat global. Coleman juga menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, individu melakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang didapat. Pertimbangan tersebut dilakukan guna mendapatkan keputusan yang terbaik. Teori pilihan rasional dapat diteapkan di semua level masyarakat, baik pada sector budaya maupun politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam teori pilihan rasional digunakan pertimbangan-pertimbangan kognitif yang menegdepankan keuntungan paling maksimal bagi pihak-pihak yang menerapkannya.<sup>22</sup>

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada actor. Actor dipandang sebagai seseorang yang memiliki tujuan dan mempunyai maksud. Dalam hal ini actor dianggap sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dan setiap tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan. Actor juga dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta Teori pilihan rasional. Teori ini dalam pandangan Coleman sebagai paradigma tindakan rasional yang merupakan integritas berbagai paradigma sosiologi. Walaupun dalam teori pilihan rasional pada tahap awalnya mengacu pada tujuan atau maksud yang dilakukan individu, setidaknya ada dua pemaksa tindakan yang mempengaruhi individu yakni keterbatasan sumberdaya dan Lembaga social. Keterbatasan sumberdaya menjadi salah satu factor terjadinya pemaksa tindakan. Actor yang memiliki sumberdaya berlebih maka semakin besar pula kesempatan untuk merai tujuannya. Sedangkan Lembaga social dianggap dapat menghambat tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan Lembaga social akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan

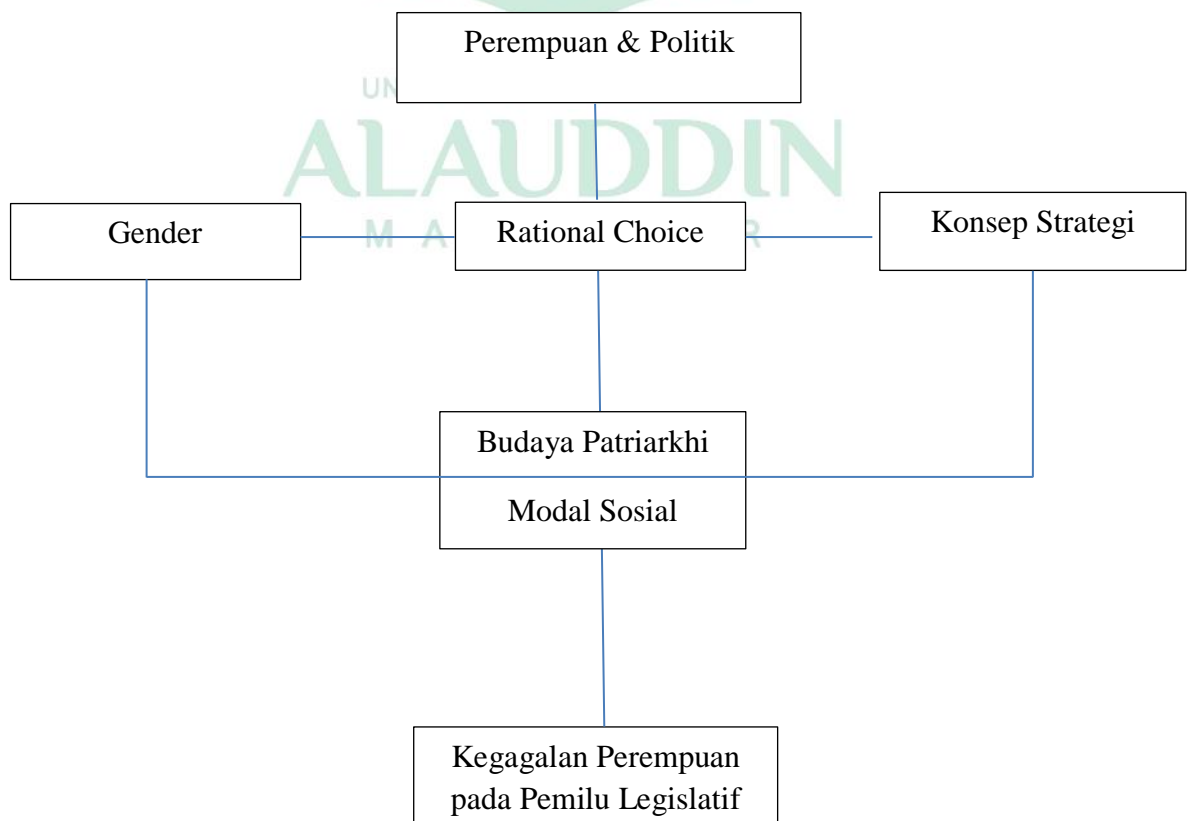
---

<sup>22</sup> G.P.B Suka Arjawa, *Pilihan Rational di Balik Pembebasan Corby*. Hlm.52

actor, menjatuhkan sanksi yang dapat mendorong atau justru menghambat actor untuk mencapai tujuannya.

Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional. Hal ini dikarenakan perilaku social setiap individu berbeda. Ada individu yang berfikir pragmatis dan mengabaikan pilihan-pilihan yang rasional dan lebih memilih apatis terhadap pilihan yang diambil. Pikiran individu dalam masyarakat juga tidak sedikit masih berikir tradisional. Pikiran ini terikat oleh tradisi, berbeda dengan masyarakat yang berikir modern, pikirannya diikat rasionalitas. Masyarakat yang berfikir modern akan bertindak dan berfikir berdasarkan efek yang akan dihasilkan oleh pilihannya bagi masa kini dan masa mendatang.

## B. KERANGKA KONSEPTUAL



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Dalam penelitian yang berjudul “Perempuan dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Luwu utara”, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Sementara itu, menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. (1998:24), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>23</sup>

Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sujana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>24</sup> Selama penelitian dilapangan, penulis menggunakan berbagai metode kualitatif yakni wawancara

---

<sup>23</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Vol 5 No 8, 2009, hlm.2

<sup>24</sup> Online) <https://academia.edu/jurnal-metode-penelitian-deskriptifpd.html> (diakses pada 2 juni 2020)

dengan informan, observasi dan analisis dokumentasi. Maka penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan kegagalan perempuan dalam pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Sehingga memperoleh umpan balik dari aktivitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret tahun 2021.

***C. Fokus Penelitian***

Focus dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya perempuan pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara dan pandangan masyarakat terhadap budaya patriarki. Adapun informan yang menjadi objek penelitian yakni beberapa calon anggota legislative perempuan yang mengikuti kontestasi politik tahun 2019, kemudian masyarakat sebagai pemilih, serta partai politik yang mengusung caleg perempuan di pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Dalam konteks ini, informan tersebut dapat memberikan gambaran jawaban dari judul penelitian yang diangkat penulis.

***D. Sumber Data Penelitian***

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan atau bahan nyata yang

dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>25</sup> Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap".<sup>26</sup> Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa data merupakan suatu alat analisis yang berupa keterangan yang bersifat nyata dan ketahu atau memiliki indeks kebenaran diatas 90 persen. Sebelum melakukan analisis, data dikelompok-kelompokkan sesuai dengan karakteristik yang menyertainya.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer juga merupakan suatu objek atau dokumen original-material mentah dari perilaku yang disebut "*first-hand information*". Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Sumber data primer yang pertama yaitu informan. Dari informan inilah, peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah calon anggota legislative perempuan yang mengikuti kontestasi politik tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Yakni ibu ANG dan RS yang merupakan incumbent yang gagal pada pileg 2019 serta ibu E dan SN yang sudah kali kedua mencalonkan namun masih gagal pada pileg 2019 serta beberapa caleg baru.

Sementara itu, sumber data primer yang kedua adalah informan yang merupakan sumber berupa orang, dari beberapa informan, diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang dapat dianalisis sebagai jawaban dari

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima

<sup>26</sup> Online) <https://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/15Arus> (Diakses pada 03 Juni 2020)



permasalahan yang hendak diteliti, sehingga informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan adalah Masyarakat umum dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan caleg 2019.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data ini diperoleh melalui telaah dokumentasi yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan serta studi-studi penulisan yang sejenis yang ada hubungannya dengan kegagalan perempuan dalam pemilu legislative 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan Analisa penelitian. Metode pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam metode maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang valid dan reabel. Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

## **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara cermat dengan menggunakan alat bantu yang tidak berupa pancaindra seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.<sup>27</sup> Observasi dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap factor-faktor yang memungkinkan terjadinya kegagalan perempuan pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Dalam melakukan onservasi, penulis mengunjungi lokasi penelitian dengan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan terkait perempuan dan politik.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat penelitian verbal (voice recording) dan pedoman wawancara.

Teknik wawancara dalam penelitian ini ditunjukan untuk mengungkapkan seputar factor-faktor yang menyebabkan gagalnya perempuan pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Teknik ini untuk menginformasikan tentang data yang diperoleh dari observasi. Adapun tahapan-tahapan wawancara yaitu:

- a) Menentukan siapa yang akan diwawancarai

---

<sup>27</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Vol 5 No 8, 2009, hlm.7

- b) Mempersiapkan wawancara
- c) Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif
- d) Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman wawancara

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Calon Legislatif Perempuan (diacak)
- b) Masyarakat setempat

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen berupa tulisan dan gambaran objek penelitian untuk membandingkan data sebelum dan sesudah penelitian. Analisis dokumentasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah, disamping menambah pemahaman dan informasi penelitian. Dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, artikel, laporan tahunan, majalah, jurnal, karya tulis, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang telah tersedia pada Lembaga yang terkait, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik dokumentasi juga termasuk menelusuri data-data atau informasi secara online yang terkait dengan kegagalan perempuan pada pemilu legislatif maupun informasi pendukung untuk melengkapi gambaran umum lokasi penelitian.

#### ***F. Teknik Analisis data***

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris diperoleh adalah data

kualitatif yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman dalam Silahi, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu jalinan yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). Pilihan-pilihan terkait penelitian tentang bagian-bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu masuk dalam pilihan analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

## **2. Penyajian Data**

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan melalui data yang disajikan, dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan, semuanya dirancang guna menghubungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, analisisnya akan dilanjutkan pada tahapan menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisarkan oleh bagian dari analisis.

## **3. Menarik Kesimpulan**

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada saat pengumpulan data maka analisis dilakukan dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya yang merupakan hasil dari validitasnya. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih

terperinci. Sehingga kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sejak awal.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara**

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara  $01^{\circ} 53' 019''$  -  $02^{\circ} 55' 36''$  Lintang Selatan (LS) dan  $199^{\circ} 47' 46''$  -  $120^{\circ} 37' 44''$  Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kab Luwu & Teluk Bone
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Prov Sulawesi Barat
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kab Luwu Timur

Wilayah Kabupaten Luwu Utara sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Luwu, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 menjadi 2 daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan kembali menjadi dua wilayah daerah kabupaten yaitu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. sampai paada tahun 2017, Kabupaten Luwu Utara memiliki 12 wilayah kecamatan dan 173 desa/kelurahan. Pada awal tahun 2018 ini, pihak legislatif dan eksekutif telah mengesahkan ranperda tentang pembentukan tiga wilayah

kecamatan pemekaran menjadi Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian Kabupaten Luwu Utara untuk tahun 2018 sampai saat ini telah memiliki 15 wilayah kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 166 desa. Luwu Utara memiliki luas wilayah Kabupaten Luwu Utara  $\pm 7.843,57 \text{ Km}_2$ .

Diantara 15 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Seko yang terluas dengan luas 2.109,19  $\text{Km}_2$  atau 28,11 % dari total wilayah kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan terletak paling jauh dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara yakni berjarak 198 Km. terluas kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65  $\text{Km}_2$  atau 20,87% dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75  $\text{Km}_2$  atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara. Dan pada tahun 2012 di bentuk satu kecamatan baru yang pemekarannya dari kecamatan Bone-Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor: 01 tahun 2012 tanggal 05 April 2012 dan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19: Tahun 2012 Tanggal 04 Juni 2012 tentang pembentukan Kecamatan Tana Lili dengan jumlah 10 Desa. Kemudian pada tahun 2018 tiga wilayah di Kabupaten Luwu Utara kembali dimekarkan yakni Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan dan Kecamatan Sabbang Selatan. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara nomor 1 tahun 2018 tentang pemekaran Kecamatan Sukamau Selatan. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2018 tentang pembentukan





persen), bergelombang (8-15 persen), berbukit (15-30 persen) dan perbukitan terjal/curam (>30 persen), secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Kelas Lereng	Ketinggian	Keterangan Fisik Lahan
1	Sabbang	8 – 15	25 – 100	Bergelombang
2	Sabbang Selatan	8 – 15	25 – 100	Bergelombang
3	Baebunta	8 -15	25 – 100	Bergelombang
4	Baebunta Selatan	8 – 15	25 – 100	Bergelombang
5	Malangke	0 – 8	0 – 100	Landai
6	Malangke Barat	0 – 8	0 – 100	Landai
7	Sukamaju	0 – 15	25 – 100	Landai & Bergelombang
8	Sukamaju Selatan	0 – 15	25 – 100	Landai &

				Bergelombang
9	Bone-Bone	0 – 8	0 – 100	Landai & Bergelombang
10	Masamba	3 – 15	25 – 100	Landai & Bergelombang
11	Mappedeceng	3 – 15	25 – 100	Landai & Bergelombang
12	Rampi	> 30	> 1000	Curam
13	Rongkong	15 – 30	500 – 1000	Berbukit
14	Seko	15 – 30	> 1000	Berbukit
15	Tana Lili	0 – 8	0 – 100	Landai

b) Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan diukur dari permukaan laut (dpl) sebagai titik nol. Dalam kaitannya dengan tanamaan, secara umum sering dibedakan antara dataran rendah (>700 m dpl). Namun dalam kesesuaian tanaman terhadap ketinggian tempat berkaitan erat dengan temperature dan radiasi matahari. Semakin tinggi tempat di

atas permukaan laut, maka temperature semakin menurun. Demikian pula dengan radiasi matahari cenderung menurun dengan semakin tinggi dari permukaan laut. Ketinggian tempat dapat dikelaskan sesuai kebutuhan tanaman, misalnya tanaman teh dan kina lebih sesuai pada daerah dingin atau daerah dataran tinggi. Sedangkan tanaman karet, sawit, dan kelapa atau komoditi sejenisnya lebih sesuai di daerah dataran rendah.

c) Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Luwu Utara dapat ditelusuri dari batuanannya. Secara spasial kondisi geologi dapat dilihat stratigrafi batuan yang ada di Kabupaten Luwu Utara seperti tabel berikut:

No	Jenis Batuan	Wilayah Cakupan	Keterangan
1	Alluvium & Coastal Deposit	Bebunta, Baebunta Selatan, Malngke, Malangke Barat, Bone-Bone, Sukamaju, Sukamaju Selatan	Litmarin, Pasir, Kerikil & Terumbu Karang
2	Batuan	Rampi,	Pasir, Liat dan

	Endapan Dana	Rongkong & Seko	Kerikil
3	Celebes Molasse	Sukamaju, Sukamaju Selatan & Bone-Bone	Konglomerat, Standstone, Claustone & Marl Berkapur
4	Intrusive Rock (Batuan Intrusif)	Mappedeceng & Rampi	Diorite, Porphyry, Syenit, Trachyte, Gbro, adamilit, monzonit, phonolit, dolerite, & kentalenit
5	Batuan Vulkanik	Seko	Basaltic, Spilitic, Calc- alkaline, breccia, tuff, lava & pillow.

d) **Struktur dan Karakteristik**

Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenalan atau attribute yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaman (performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi pengguna tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics). Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan, ada empat kelompok kualitas lahan utama: a. kualitas lahan ekologis yang berhubungan dengan kebutuhan tumbuhan seperti ketersediaan air, oksigen, unsur hara dan radiasi; b. Kualitas yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan normal, seperti kemungkinan untuk mekanisasi pertanian; c. Kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan, seperti respon terhadap pemupukan, kemungkinan untuk irigasi dan lain-lain, d. Kualitas konservasi yang berhubungan dengan erosi.

**3. Kondisi Politik, Hukum dan Keamanan**

a) **Politik dan Hukum**

Seiring dengan pembaharuan system Politik dan Hukum Nasional yang diarahkan pada proses konsolidasi demokrasi yang berkesinambungan, kesadaran akan hak-hak masyarakat Luwu Utara terhadap kehidupan Politik dan Hukum telah menunjukkan suatu ekspektasi yang cukup mengembirakan. Hal ini dapat dirasakan baik secara individu maupun lembaga yang senantiasa bersinergi dengan kondisi yang ada dalam mendukung terciptanya kualitas proses politik yang kondusif serta penegakan hukum yang konsisten dan bertanggungjawab, dalam bidang Politik di Kabupaten Luwu Utara terdapat 11 partai politik

kontestan pada Pemilu 2020, dari ke 11 parpol tersebut terdapat 6 Parpol yang mempunyai keterwakilan pada lembaga DPRD Kabupaten Luwu Utara dari 4 daerah pemilihan selama berlangsungnya pesta demokrasi di Kabupaten Luwu Utara baik pada Pemilu Legislatif maupun Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 lalu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat konflik yang dapat mengancam keamana dan ketertiban umum daerah, kendati berada dalam suatu kondisi yang sifatnya sangat kompetitif. Kondisi inilah yang perlu dipertahankan guna memberikan jaminan terciptanya proses politik yang semakin berkualitas pada masa-masa yang akan datang. Satu hal yang menarik pada pemilihan kepala daerah 2020 kemarin yakni keterlibatan kaum millennial dalam kemenangan salah satu calon kepala daerah. Masing-masing dari kedua belah pihak mengatas namakan sebagai “Teman Mudata” dan “Millenial Bisa”. Hal ini menjadi menarik karena keterlibatan kaum millennial di kanca politik baru pertama muncul kepublik pada tahun 2020 kemarin.

b) Keamanan

Kelancaran proses pembangunan atau bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu daerah atau wilayah sangat tergantung dengan stabilitas keamanan, di Kabupaten Luwu Utara terdapat 1 Polres dan 1 Kodim yang menjadi pusat komando dan sebagai coordinator dalam kestabilan di Kabupaten Luwu Utara. Masing-masing kecamatan memiliki polsek dan koramil sebagai alat control untuk menjaga keamanan dan konflik yang akan terjadi dilingkungan wilayah masing-masing, dalam membantu terlaksananya pengendalian keamanan maka atas keswadayaan masyarakat membentuk forum



massa di tiap-tiap Kecamatan forum tersebut bertugas membantu pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam upaya mewujudkan stabilitas ketertiban masyarakat.

Hal ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pencapaian ketentraman masyarakat dan berdampak pula kepada terwujudnya perlindungan hukum di kalangan masyarakat secara menyeluruh.

#### **4. Kondisi Politik Perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan**

Hingga saat ini perbincangan mengenai perempuan dan politik masih belum usai. Banyak terobosan terobosan yang terus dilakukan guna mencegah terjadinya diskriminasi atau pengucilan pada kaum perempuan. Isu kesetaraan gender terus mencuat di kalangan masyarakat sehingga tidak sedikit dari kalangan feminisme terus memperjuangkan hak-hak perempuan yang dianggap telah dirampas oleh budaya yang dibuat masyarakat itu sendiri. Wacana kesetaraan itu terus digaungkan dan membuat sebagian perempuan berani keluar dari penjara sosial yang telah lama membelenggunya. Di Indonesia sendiri, salah satu bentuk aktualisasi kesetaraan gender yakni pembuatan regulasi kuota 30% untuk perempuan di parlemen. Regulasi ini tentu tidak dijadikan perempuan sebagai satu-satunya ruang untuk menunjukkan kualitas dirinya. Saat ini, untuk provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perempuan yang bersaing mendapatkan kedudukan di ruang publik tidak dapat disepelekan lagi karena bukan hanya laki-laki, perempuan juga kini berlomba-lomba dalam setiap kontestasi politik. Berikut tabel kondisi politik perempuan di Sulawesi Selatan satu tahun terakhir:



No	Nama Calon Kepala Daerah	Kepala Daerah Terpilih	Nama Daerah	Persentase Perempuan
1	1. Danny-Fatma 2. Appi-Rahman 3. Dilan 4. Imun	Danny-Fatma	Makassar	25% (Menang)
2	1. Mudassir Hasri Gani- Aksah Kasim 2. Suardi Saleh- Aska M 3. Malkam Amin-A Salahuddin Rum	Suardi Saleh- Aska M	Barro	0%
3	1. Andi Hamza Pangki- Murniati 2. Askar HL- Arum Spink 3. Muchtar Ali Yusuf-Edy Manaf	Muchtar Ali Yusuf-Edy Manaf	Bulukumba	25% (Kalah)
4	1. Muh Thoriq Husler- Budiman 2. Irwan Bachri Syam-Andi Muh Rio Patiwiri	Muh Thoriq Husler	Luwu Timur	0%
5	1. Muh Thahar Rum-Rahmat Laguni 2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur 3. Arsyad Kasmar-Andi Sukma	Indah Putri Indriani-Suaib Mansur	Luwu Utara	25% (Menang)
6	1. Andi Tajerimin Nur-Havid S Fasha 2. Chaidir Syam- Suhartina	Chaidir Syam- Suhartina Bohari	Maros	25% (Menang)

	Bohari 3. Andi Harmil Mattorang- Andi Ilham Nadjamuddin			
7	1. Muh Yusran Lalogau- Syahban Sammana 2. Abd Rahman Assagaf- Muammar Muhayang 3. Andi Ilham- Rismayani 4. Andi Nirawati-Lutfi Hanafi	Muh Yusran Lalogau- Syahban Sammana	Pangkajene dan Kepulauan	25% (Kalah)
8	1. Theofilus Allorerung- Zadrak Tombeg 2. Nicodemus Biringkanae- Victor Datuab Batara 3. Albertos Patarru-John Diplomasi	Theofilus Allorerung- Zadrak Tombeg	Tana Toraja	0%
9	1. Yosia Rinto Kadang- Yonathan Pasodung 2. Yohanis Bassang- Frederik V Palimbong 3. Kalatiku Paembona- Etha Rimba P Tandi Payung	Yohanis Bassang- Frederik V Palimbong	Toraja Utara	0%
10	1. Kaswadi Razak-Lutfi Halide	Kaswadi Razak-Lutfi Halide	Soppeng	0%
11	1. Adnan Purichta	Adnan Purichta	Gowa	0%

	Ichsan-Abdul Rauf Malaganni	Ichsan-Abdul Rauf Malaganni		
<b>12</b>	<b>Persentase Keterpilihan Pada Pilkada Sulsel</b>	<b>27%</b>		

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mengikuti pilkada pada tahun 2020 kemarin baik sebagai wakil kepala daerah maupun sebagai kepala daerah yakni 42%, angka ini ditunjukan dari hasil analisis dan hasil olah data yang dilakukan peneliti guna mendapatkan hasil persentase keterwakilan perempuan pada pilkada 2020. Angka 42% merupakan angka dari banyaknya perempuan yang mencalonkan sebagai kepala daerah, angka tersebut memang terbilang tinggi hanya saja yang berhasil menjadi kepala daerah hanya 27% atau sekitar 3 paslon kepala daerah. Dari ketiga paslon tersebut hanya satu daerah yang dipimpin langsung oleh perempuan yakni Kabupaten Luwu Utara yang sekarang dinahkodai oleh Ibu Indah Putri Indriani. Dengan demikian Ibu Indah Putri Indriani sampai saat ini masih menjadi satu-satunya kepala daerah perempuan di Sulawesi Selatan selama dua periode.

Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Luwu Utara khususnya perempuan. Karena dengan terpilihnya Kembali Bupati cantik tersebut maka keberadaan perempuan di ruang publik harusnya semakin menjanjikan. Tidak hanya itu, regulasi pada pemilihan legislative juga membuka ruang bagi perempuan untuk mengisi ruang-ruang public dan tentu saja tidak sedikit perempuan yang menggunakan kesempatan tersebut untuk beradu gagasan dalam memperebutkan kursi parlemen. Berikut tabel persentase keterpilihan perempuan pada pileg 2019:

No	Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan Perempuan di Pileg 2019
1	Luwu Utara	0%
2	Luwu Timur	7%
3	Makassar	24%
4	Palopo	28%
5	Luwu	6%
6	Sinjai	27%
7	Bulukumba	20%
8	Bantaeng	32%
9	Takalar	27%
10	Gowa	29%
11	Maros	26%
12	Enrekang	10%
13	Pangkajene	11%
14	Parepare	16%
15	Sidrap	28%
16	Wajo	8%
17	Pinrang	10%
18	Tana Toraja	15%
19	Toraja Utara	17%
20	Bone	3%
21	Soppeng	9%
22	Jeneponto	23%
23	Kepulauan Selayar	20%
24	Barru	24%
25	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	26%

Dari Berbagai Sumber

Dari tabel diatas menunjukkan persentase keberhasilan perempuan di parlemen. Regulasi yang mengharuskan keterlibatan perempuan pada pemilihan legislatif tentu saja menjadi salah satu modal awal bagi perempuan untuk lebih berani mengurus hal-hal di luar wilayah domestic. Keberhasilan perempuan pada pemilihan legislative 2019 terlihat pada Kabupaten Bantaeng. Pada pileg 2019 kemarin, DPRD Bantaeng mencatat keterwakilan perempuan yang terpilih mencapai angka 32%. Hal ini tentu saja menjadi suatu keberhasilan yang patut di banggakan, karena perempuan di Kabupaten Bantaeng dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang sama dengan calon legislatif laki-laki sehingga mereka dapat mencapai angka tersebut, meskipun angka tersebut bukanlah angka maksimal yang harus di capai oleh perempuan namun hal itu sudah membawa angin segar bagi perempuan dalam pemilihan-pemilihan berikutnya.

Berbeda dengan kabupaten Bantaeng yang berhasil mencapai angka 32% untuk keterwakilan perempuan di parlemen, kabupaten Luwu Utara yang dipimpin oleh Bupati perempuan selama dua periode justru tidak mencatat nama perempuan dalam daftar nama anggota legislatif terpilih tahun 2019. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang di harapkan dari calon-calon legislatif perempuan, sehingga mebangun berbagai macam spekulasi diluar. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk menjabarkan apa yang menjadi permasalahan mendasar calon legislatif perempuan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara.

## 5. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Perempuan di Parlemen Kabupaten Luwu Utara

Partai politik di Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi kuota untuk keterwakilan perempuan sebagai syarat menjadi peserta pemilu. Kabupaten Luwu Utara memiliki 4 Dapil yakni Dapil 1 Mappedeceng, Masamba dan Rampi, Dapil 2 Bone-Bone, Sukamaju dan Tana Lili, Dapil 3 Malangke dan Malangke Barat, Dapil 4 Baebunta, Sabbang, Rongkong dan Seko. Di Kabupaten Luwu Utara sendiri ada 376 daftar caleg yang tercatat pada surat suara.

Jumlah Seluruh Calon Legislatif Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

No	Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kebangkitan Bangsa	19	11	30
2	Gerakan Indonesia Raya	22	12	34
3	Demokrasi Indonesia Perjuangan	20	12	32
4	Golongan Karya	23	12	35
5	Nasdem	23	12	35
6	Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0

7	Berkarya	0	0	0
8	Persatuan Indonesia	23	12	35
9	Persatuan Pembangunan	10	8	18
10	Solidaritas Indonesia	9	5	14
11	Hati Nurani Rakyat	20	11	31
12	Demokrat	23	12	35
13	Bulan Bintang	5	3	8
14	Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap partai politik telah memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Jumlah perempuan yang mencalonkan pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara yakni sebanyak 110 orang. Daftar calon legislatif perempuan memang hanya setengah dari daftar calon legislatif laki-laki, namun jumlah tersebut dapat dikategorikan cukup baik. Dengan terpenuhinya kuota 30% pada setiap partai politik, menjadi dasar bahwa keterwakilan perempuan calon anggota legislatif Kabupaten Luwu Utara mencapai 30% dari seluruh anggota, hal

ini juga membuat peluang perempuan menjadi besar untuk duduk di kursi parlemen.

Hanya saja, hasil pemilu anggota legislatif 2019 di Kabupaten Luwu Utara tidak meloloskan satupun calon perempuan, meskipun sebelumnya semua partai politik telah memenuhi kuota 30% tersebut. Bahkan dua incumbent yang kembali mencalon yakni Ibu Rafika Said dan Ibu Andi Nirwana Gazaling juga tidak lolos menduduki kursi parlemen 2019. Banyak yang berpendapat bahwa masyarakat Luwu Utara masih menganut budaya Patriarki dan cenderung memilih jika ada uang politiknya. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, Sebagian informan mengutarakan beberapa alasan mengapa mereka beranggapan bahwa perempuan memang tidak sepantasnya memimpin laki-laki. Mereka menguatkan argumennya dengan menyebutkan beberapa hadis yang salah satunya hadis yang di riwayatkan HR. Al-Bukhari:

امرأة أمرهم ولأول قوم يفلح لن

Artinya: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.

Dari tarikan hadis di atas, penulis mencoba mengaitkan bagaimana perempuan juga berperan penting pada masa Rasulullah, hal ini untuk menyeimbangkan pemikiran-pemikiran masyarakat yang hanya memandang pada satu sisi saja. Pada masa Rasulullah, perempuan sebenarnya telah memainkan peran politisnya dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi dan *berbai'at* kepada



Nabi, dan melakukan jihad atau ikut sera dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Para perempuan Arab saat itu dengan kesadaran politiknya turut hijrah ke Madinah walaupun menghadapi kesulitan yang bermacam-macam. Roqoyyah binti Rasulullah dan Zainad mengalami keguguran kandungan dalam perkalanan hijrah. Umu Aiman tetap berhijrah walaupun dengan berjalan kaki dan tanpa bekal apapun kecuali pemebrian orang dijalan. Itulah perjuangan mereka untuk menegakkan Islam. Perjuangan kaum perempuan pada masa Rasulullah tidak hanya sampai pada hijrah saja, namun mereka turut serta dalam peperangan, meskipun secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Mereka ikut serta dalam konflik bersenjata, baik dengan cara mempersiapkan makanan dan minuman serta merawat orang yang terluka atau juga turut serta memainkan peran penting dalam pertarungan.

Meskipun masih banyak yang berfikir patriarki, tetapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa perempuan juga bisa memimpin, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Ibu Indah dua periode sebagai Bupati Luwu Utara. Sebenarnya Ada banyak faktor lain yang bisa saja mempengaruhi gagalnya perempuan menduduki kursi parlemen. Bukan hanya perempuan, namun caleg laki-laki juga memiliki peluang yang sama untuk tidak lolos ke parlemen jika faktor-faktor tersebut ada pada mereka.

Dari penelitian yang lakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Luwu Utara. Yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri meliputi Strategi Politik: Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi.

Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kampanye, tim sukses, wajah baru calon legislatif, perolehan suara partai serta suara individu.

## **1. Faktor Internal**

### **a. Modal Sosial**

Modal sosial merupakan hal yang sangat penting bagi setiap calon legislative yang hendak bertarung di pemilihan. Eksistensi dan nilai-nilai sosial yang dimiliki para calon bisa menjadi modal utama untuk menarik perhatian pemilih. Banyak pemilih yang menilai para calon legislative dari hubungan sosialnya, sehingga saat pemilihan nanti masyarakat tidak salah menaruh harap pada mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat. Pada prinsipnya, modal sosial berbicara mengenai ikatan atau kehesi sosial. Gagasan sentral modal sosial tentang ikatan sosial adalah bahwa jaringan merupakan asset yang sangat bernilai dasar bagi kohesi sosial karena mendorong iklim kerjasama untuk memperoleh manfaat (Field, 2010).<sup>28</sup> Menurut James Coleman (John Field: 2013) menjelaskan bahwa konsep modal sosial merupakan sarana dalam menjelaskan bagaimana seseorang atau komunitas dalam melakukan kerjasama.<sup>29</sup>

Modal sosial yang dimiliki calon anggota legislative terkhususnya perempuan pada pemilihan legislative tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara tergolong sangat kurang. Dari beberapa informan yang peneliti wawancara banyak di antara mereka yang tidak mengetahui sama sekali bahwa di daerah pilihan mereka ada perempuan yang mencalonkan. Sisanya, yang mengetahui

---

<sup>28</sup> Rusydan Fathy, Modal Sosial: Konsep, inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 6 No 1, 2019, hlm.3

<sup>29</sup> Herdiyanti S.Sos., M.Si, Identifikasi Modal Sosial Masyarakat Terhadap Restorasi Lahan Pasca Tambang (Studi Masyarakat Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Vol V No 1, 2017, Hlm.15

keberadaan perempuan pada pemilihan legislative kemearin cenderung sangat sedikit. Diantara mereka yang mnegetahui adalah melalui kerabat atau teman yang kebetulan menjadi calon legislative perempuan tersebut. Seperti yang dikatakan salah satu informan yakni Windi Aziz masyarakat Desa Balebo Kec. Masamba yang mengaku tidak tahu sama sekali bahwa di Daerah Pilihannya ada calon perempuan.

“Bagaimana mau dipilih, di tau saja bilang ada caleg perempuan na tidak.

Tapi sebenarnya tidak bagus juga kalau perempuan memimpin, ada hadis yang jelaskan itu kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Baru selama ini tidak adaji juga progress yang di tunjukan perempuan di parlemen.<sup>30</sup>

Di tempat lain, pengakuan mereka yang mengetahui tentang keberadaan perempuan di parlemen mengenal calon dari teman dan kerabat. Salah satunya Asri Ainun yang berdomisili di Desa Nanna Kec. Mappedeceng mengaku bahwa mengetahui calon perempuan itu dari salah satu teman dan kerabatnya yang kebetulan saat itu orang tuanya yang menjadi salah satu calon anggota DPRD Perempuan dan kerabatnya yang kebetulan bertetangga dengan yang bersangkutan.

“Ada saya tau, mamanya Dwicki yang samping rumahnya neneku di Masamba tinggal, tapi waktu pemilihan bukan dia ku pilih karna masih banyak caleg laki-laki yang pantas jadi anggota DPRD”.<sup>31</sup>

Jika diukur dengan modal sosial yang dimiliki laki-laki, tentu masih terlihat sangat jauh jika dibanding dengan calon anggota legislative perempuan.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Saudari Windi Aziz tanggal 31 Januari 2021, jam 20.00

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Saudari Asri Ainun tanggal

Banyak yang menganggap bahwa mereka yang mencalonkan kebanyakan kaum laki-laki lah yang selalu berbaur dengan masyarakat dan melakukan kampanye-kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk kampanye yang sering dilakukan oleh calon legislative laki-laki adalah pertandingan Olahraga yang juga disambut hangat oleh masyarakat. Cara seperti ini sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan oleh calon perempuan. Padahal meskipun terdengar metode kampanye ini hanya menyisir pihak laki-laki saja, namun banyak dari kalangan perempuan yang juga menanti-nanti perlombaan tersebut, karena bukan hanya olahraga khusus laki-laki tapi juga olahraga untuk kaum perempuan. Hanya saja metode kampanye seperti ini memang memerlukan banyak biaya.

Selain itu, kebanyakan calon legislative perempuan hanya melakukan sosialisasi di Media Sosial saja dengan memasang pamflet di media sosial tanpa kunjungan langsung ke masyarakat. Mereka begitu mengandalkan media sosial untuk memperbanyak jaringan, padahal tidak semua masyarakat mendapat jangkauan kesana. Meskipun pada tahun 2014 lalu, ada dua perempuan yang berhasil lolos keparlemen, itu karena mereka memiliki setidaknya modal sosial dan modal politik yang cukup. Salah satu calon perempuan yang lolos tersebut adalah Ibu Rafika Said yang pada saat itu merupakan istri dari Bupati Luwu Utara bapak H. Arifin Djunaedi. Selain memiliki modal sosial dan politik, beliau juga memiliki modal ekonomi tentunya sehingga dapat mengamankan satu kursi di parlemen.

Menurut penulis, banyak calon perempuan yang mencalonkan hanya sekedar pasang nama atau hanya untuk memenuhi regulasi 30%. Faktanya, salah satu dari anggota calon legislatif perempuan yang penulis wawancarai yakni Ahsana Riska Dapil 4 Dari Partai Nasdem, saat peneliti mempertanyakan persoalan metode kampanye yang digunakan saat pemilihan kemarin, yang bersangkutan tidak dapat menjawab dan memilih untuk tidak merespond pertanyaan tersebut. Artinya, dari sudut pandang peneliti, mereka yang menjadi aktor pada saat itu saja bingung tentang metode kampanye apa yang mereka gunakan karena memang jika bertanya ke masyarakat mengenai calon perempuan tersebut jawabannya akan sama, yakni ketidakjelasan arah dan visi misi yang ditawarkan calon perempuan tersebut.

Modal sosial menjadi modal awal yang sangat berpengaruh pada hasil pertarungan nantinya. Banyak masyarakat yang melihat wakilnya dari bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat, meskipun hanya sekedar pencitraan namun masyarakat bisa memulai pilihan dari modal tersebut.

b. Modal Politik

Selain modal sosial, modal politik juga dapat berpengaruh terhadap hasil pemilihan. J.A Booth dan P.B Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga Negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Selanjutnya A.Hick dan J Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan atau sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan.<sup>32</sup> Memiliki modal dianggap sangat perlu bagi para

---

<sup>32</sup> Junaidin Basri, Pemilu, Partisipasi dan Modal Politik Perempuan

calon anggota legislatif di pemilu. Modal politik dapat dimiliki seorang calon legislative dari proses membangun jaringan dengan elit politik atau organisasi. Dengan memiliki modal politik, maka calon tersebut layak mempunyai peluang kekuasaan atau sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan. Kekuatan modal politik menjadi dasar pertimbangan keterpilihan bagi calon anggota legislatif, tidak hanya dari dukungan partai politik, melainkan dukungan elit-elit politik baik lokal maupun pusat, jaringan organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Modal politik tidak hanya dari jalinan kekerabatan dengan elite politik melainkan jaringan dari structural partai, hubungan pertemanan serta, organisasi sosial yang pernah diikuti.

Dari beberapa calon legislatif perempuan di Kabupaten Luwu Utara, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang politik dan jaringan politik, selebihnya bahkan tidak memiliki pengalaman politik. Sedangkan dalam sebuah kontestasi politik, bekal dari pengalaman politik dan jaringan politik merupakan modal yang sangat penting. Modal politik membuka peluang besar bagi pelaku politik untuk setidaknya mengetahui strategi-strategi politik untuk sampai ke tujuannya. Selain itu, modal ini juga sebagai usaha untuk membentuk jaringan-jaringan yang luas guna mendapat perhatian calon pemilih untuk setidaknya membantu dalam hal kampanye mulut ke mulut serta memberi akses yang lebih mudah untuk setidaknya melakukan pendekatan dengan berbagai calon pemilih.

Modal politik merupakan metafora yang digunakan dalam teori politik untuk mengkonseptualisasikan akumulasi sumber daya dan kekuasaan yang dibangun melalui hubungan, kepercayaan, niat baik, dan pengaruh antara politisi

atau partai dan pemangku kepentingan lainnya, seperti konstituen.<sup>33</sup> Dalam kasus pemilihan legislative, modal politik digunakan untuk mencapai tujuan dengan cara yang sedikit elegant dengan dukungan orang-orang yang berpengaruh misalnya. Seperti yang terjadi pada ibu Rafika Nursaid saat itu. Pada saat pemilihan legislative 2014 silam, status beliau sebagai istri dari Bupati Luwu Utara yakni Bapak H Arifin Junaedi. Hal ini membuat Ibu Rafika memiliki modal yang terbilang sudah cukup kuat karena selain modal sosial tentu beliau juga mendapat dukungan dan bantuan dari banyak pihak termasuk tim-tim yang sebelumnya berada dibelakang Bapak H Arifin Junaedi. Ini menjadi nilai Plus bagi calon kaarena semakin banyak koneksi maka semakin mudah pula dalam melakukan sosialisasi kepada calon pemilih atau masyarakat. Selain Ibu Rafika, di tahun 2014 juga meloloskan salah satu calon legislative di dapil 2 Yakni Ibu Nirwana Andi Gazaling. Beliau juga memiliki modal politik yang cukup. Dilihat dari latar belakang pendidikan beliau, beliau merupakan salah satu Lulusan Sospol Universitas Hasanuddin yang bergelar Magister. Beliau juga masih memiliki hubungan dekat dengan Bupati Luwu Utara saat itu, yakni sebagai besan. Dari sini kita bisa belajar bahwa perempuan yang mampu lolos pada saat itu hanyalah mereka yang memiliki modal politik yang kuat. Dan benar saja, pada tahun 2019, keduanya kembali mencalonkan namun keduanya sama-sama gagal.

c. Modal Ekonomi

Dalam setiap kontestasi politik, tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Modal yang dimaksud disini adalah modal yang digunakan saat

---

<sup>33</sup> <https://en.wikipedia.org> (online) diakses pada tanggal 2 April 2021 Jam 20.58



berkampanye. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa dalam moment-moment menjelang pemilihan, biasanya masyarakat juga menantikan metode-metode kampanye yang akan dilakukan para calon, salah satunya melakukan perlombaan apakah itu antar Desa maupun antara Dusun, dan model kampanye tersebut memerlukan banyak biaya. Selain itu, pemasangan spanduk atau Baliho, pembuatan posko pemenangan dan pembentukan tim-tim sukses para calon juga harus merogok kocek yang jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan banyak paradigma yang menyebutkan bahwa calon perempuan terkesan takut mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Berbeda dengan calon laki-laki yang selalu terlihat total meski harus mengeluarkan uang yang tidak main-main jumlahnya.

Selain itu, budaya menegharapkan politik uang juga masih menjamur dikalangan masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa politik uang merupakan kesempatan bagi mereka untuk setidaknya dapat menikmati apa yang didapat dari pesta demokrasi tersebut. Seperti yang dikatan oleh salah satu narasumber pada penelitian ini “na ini ji bisa dilihat dari hasil pemilihan nanti, karena kalau sudah terpilih tidak akan melihat kebelakangmi, bahkan kalau ketemuki dijalan pura-pura mi itu tidak na lihat ki jadi mending diambil memang mi selama masih ada”, ungkap Ibu Mariani. Peneliti juga membagikan angket di Instagram yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian ini, dan menemukan jawaban yang hampir serupa dari Reza Aditya yang mengungkapkan mengapa caleg perempuan sangat sulit untuk duduk di parlemen yakni karena calon



perempuan dianggap tidak memiliki banyak modal untuk meyakinkan calon pemilih.

Politik uang telah menjadi penyakit masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi. Tak hitung-hitung, sesuai fakta lapangan yang peneliti amati, memang banyak calon pemilih yang akan memilih berdasarkan siapa yang menawarkan uangnya lebih banyak bahkan ada beberapa yang menerima semua uang dari beberapa calon. Artinya, di Kabupaten Luwu Utara modal ekonomi sangat diperlukan dalam arena kontestasi politik untuk menunjang berlangsungnya proses politik itu sendiri karena kontestasi di tingkatan lokal membutuhkan sebuah tunjangan material. Politik uang juga seringkali dijadikan pembelaan saat penulis menanyakan beberapa narasumber mengenai perbandingan antara pemilihan Bupati dan Legislatif, menurut sebagian dari mereka mengapa wilayah Kabupaten Luwu Utara bisa dipimpin oleh seorang perempuan karena yang bersangkutan memiliki modal ekonomi yang besar, tapi ada juga yang mengatakan bahwa wajar ketika beliau terpilih selama dua periode karena masyarakat melihat hasil dari kerja nyatanya serta strategi politik yang terus beliau rawat.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Kampanye**

Proses kampanye merupakan salah satu penyumbang kegagalan perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara. Ini dikarenakan beberapa caleg tidak melakukan kampanye sama sekali sampai pada hari pemilihan. Berbeda dengan caleg yang berhasil menduduki kursi parlemen, mereka

melakukan kampanye yang massif sehingga dapat menarik suara pemilih. Untuk kasus Ibu NAG dan RS, incumbent yang gagal, selain karena faktor berkurangnya modal politik yang mereka miliki, proses kampanye yang mereka lakukan juga menjadi tolak ukur kegagalannya menjabat dua periode. Beberapa dari informan menyebutkan bahwa mengapa kadang masyarakat tidak memilih calon tersebut untuk kedua kalinya, karena mereka melihat dari hasil kinerjanya selama periode jabatannya, dan banyak dari mereka yang hanya mengobral janji saat kampanye semata, sesaat setelah terpilih banyak yang seolah-olah lupa dengan mereka yang dulu mendukungnya. Jika di bandingkan dengan Bapak Muhfud, strategi yang di lakukan sangat jauh berbeda, jika kebanyakan caleg perempuan hanya akan melakukan kampanye sesaat setelah mendekati pemilihan, strategi yang di gunakan Bapak Mahfud lebih kepada merawat basisnya, merawat suaranya sejak pemilihan sampai dengan pemilihan berikutnya, yang akhirnya membawa Pak Mahfud menjabat sebagai anggota DPRD kurang lebih 4 periode.

b. Tim Sukses

Pembentukan tim untuk pemenangan juga diyakini sebaagai penyumbang kegagalan perempuan pada pileg 2019. Hal ini dikarenakan jauh berbedanya jumlah tim sukses yang dimiliki antara caleg perempuan dan laki-laki. Kapasitas dan kapabilitas tim sukses yang dimiliki perempuan jauh di bawah caleg laki-laki. Jika di telusi lebih jauh, caleg laki-laki memiliki posko pemenangan hampir di setiap desa di daerah pilihannya, sedangkan perempuan bahkan untuk sektor kecamatan saja banyak yang tidak memiliki posko pemenangan. Kemudian, tim sukses untuk caleg perempuan juga banyak di dominasi oleh perempuan, sehingga

peluang untuk kerja sampai pagi sangat minim. Berbeda dengan laki-laki yang bisa bekerja sampai subuh bahkan sampai pagi pun bisa.

Ketakutan caleg perempuan untuk mengeluarkan nominal yang cukup besar menjadi pengaruh kurangnya tim sukses yang dimiliki. Beberapa kasus dari caleg yang memiliki tim sukses sangat kurang mengaku banyak yang telah menawarkan untuk menjadi tim suksesnya tapi mereka juga meminta beberapa nominal yang menurutnya tidak sedikit sehingga beberapa caleg perempuan tersebut hanya mengandalkan keluarga sebagai tim suksesnya. Padahal tim sukses merupakan salah satu bagian terpenting dari proses kampanye, karena sebuah ketidak mungkinan ketika caleg yang turun langsung ke desa-desa untuk melakukan kampanye dengan masyarakat.

c. Banyaknya Wajah Baru pada Pileg 2019

Pada pileg 2019 kemarin, jumlah caleg baru yang lolos lebih banyak di banding dengan incumbent yang artinya banyak wajah lama terisingkirkan oleh wajah-wajah baru. Berikut adalah tabel wajah – wajah baru anggota DPRD yang lolos pada pileg 2019:

No	Dapil	Incumbet Lolos	Incumbent Gagal	Wajah Baru yg Lolos
1	1	3	4	4
2	2	3	4	7

3	3	4	1	2
4	4	6	6	6

Dari tabel di atas bisa dilihat pada pileg 2019 wajah baru yang lolos sebanyak 20 orang sedangkan incumbent yang berhasil sebanyak 16 orang serta incumbent yang gagal sebanyak 15 orang. Wajah – wajah baru ini membawa pengaruh yang cukup signifikan dan menjadi faktor kegagalan perempuan khususnya dua incumbent yakni ibu NAG dan RS pasalnya mereka dikalahkan oleh wajah baru dari partai yang sama bahkan wajah baru tersebut memiliki perolehan suara terbanyak di partainya.

d. Perolehan Suara Partai dan Suara Individu

Syarat utama terpilihnya seorang caleg tentu saja dilihat dari berapa perolehan suara yang didapatkan serta perolehan suara partai yang bisa menentukan jumlah kursi anggota caleg di DPRD. Kasus ini terjadi pada beberapa caleg perempuan yang memiliki perolehan suara tertinggi pada daerah pilihannya namun karena perolehan suara partai yang sedikit maka caleg tersebut tidak dapat lolos atau gagal pada tahapan ini. Dari hasil analisis data yang ditemukan penulis, sekurang-kurangnya ada 10 caleg perempuan yang memiliki peluang untuk lolos di parlemen. jika saja terjadi PAW kemungkinan akan ada perempuan yang mendapatkan posisi pengganti tersebut, melihat ada beberapa caleg yang memiliki perolehan suara cukup tinggi di dapilnya.

Pada pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara, Partai Golkar memperoleh kursi terbanyak yakni 8 kursi di susul oleh Nasdem dan PAN yaitu masing-masing 4 kursi. Di partai Golkar sendiri, setidaknya ada 2 caleg perempuan yang memiliki perolehan suara yang menempati urutan ke 2 dan ke 4 suara terbanyak di dapilnya. Hanya saja untuk caleg yang menempati urutan ke 2 suara terbanyak tersebut memiliki perolehan suara partai yang lebih sedikit jika di banding dengan perolehan suara partai di dapil lainnya. Kasus serupa juga terjadi di lingkup partai Demokrat dimana caleg yang menempati urutan pertama suara terbanyak ada perempuan hanya saja karena suara partai di dapilnya adalah yang terendah maka caleg tersebut gagal untuk menjadi anggota DPRD.

#### **6. Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perempuan di Parlemen**

Kabupaten Luwu Utara merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Luwu Utara khususnya kaum perempuan karena dengan pencapaian tersebut kualitas maupun kuantitas perempuan bisa lebih terekspos dan dapat membuktikan bahwa saat ini bukan hanya laki-laki yang bisa menjadi seorang pemimpin namun perempuan juga. Hanya saja, sangat disayangkan karena di Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan Legislatif 2019 tidak meloloskan satu pun calon perempuan. Hasil tersebut sangat berbanding terbalik dengan hasil pilkada yang memenangkan seorang perempuan.

Perempuan terus menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat terlebih saat terpilihnya Ibu Hj Indah Putri Indriani sebagai Bupati Kabupaten Luwu Utara. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa perempuan tidak bisa memimpin selama masih ada laki-laki, namun tidak sedikit juga berfikir lebih terbuka. Jika mereka yang berpendapat bahwa perempuan tidak bisa memimpin laki-laki karena berpatokan pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal tersebut, namun ada juga Ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kebebasan perempuan dalam berpolitik, salah satunya Surah Al-Naml/27:23 yang berbunyi:

عَظِيمٍ عَرْشٌ وَلَهَا شَيْءٌ كُلِّ مَنْ وَأُوتِيَتْ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ وَجَدْتُ أَنِّي

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Ayat diatas merupakan ayat yang menjelaskan bahwa perempuan pada masa itu juga telah memimpin suatu negeri. Namun lagi-lagi, tidak hanya karena ayat Al-Qur'an, ruang gerak perempuan di ruang publik menjadi terbatas juga dikarena sebuah pemikiran-pemikiran yang telah membudaya di masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap keberadaan

perempuan di parlemen tidak begitu disambut baik oleh masyarakat. Tidak hanya kaum laki-laki, namun kebanyakan perempuan juga berfikir bahwa banyak kekurangan jika kaumnya yang menjadi wakil rakyat. pada kenyataannya, ranah publik masih saja menjadi ruang hegemoni laki-laki,

perempuan tidak mendapatkan ruang cukup untuk berpartisipasi secara total di ruang publik padahal perempuan salah satu bagian dari masyarakat yang kedudukannya setara dengan laki-laki.

Dari fakta lapangan yang didapatkan peneliti, setidaknya ada dua pandangan masyarakat terhadap keberadaan perempuan di parlemen, yakni Perempuan Sebagai Jenis Kelamin Kedua, Perempuan Sebagai Penggugat Hegemoni Laki-Laki serta Perempuan sebagai bagian terkecil dalam masyarakat.

a. Hirarki dalam perpolitikan di Kabupaten Luwu Utara Luwu Utara

Pemaknaan dari kata Jenis Kelamin Kedua disini yakni perempuan adalah makhluk yang di diposisikan pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih rendah dari laki-laki. Ruang ekspresi perempuan dipersempit sedemikian rupa sehingga potensi-potensi besar yang dimiliki perempuan terus dipenjara dalam kebungkaman budaya yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Anggapan yang terus bergulir ditengah-tengah masyarakat sepertinya masih belum bisa terkendali sepenuhnya. Meskipun memiliki seorang Bupati Perempuan, namun pandangan masyarakat terhadap perempuan di parlemen masih jauh dari semangat kesetaraan. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan di parlemen tidak akan membawa perubahan apa-apa, ada atau tidak adanya perempuan di parlemen akan tetap sama. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa DPRD tidak memerlukan perempuan didalamnya. Anggapan ini tentu bukan tidak memiliki alasan, banyak alasan yang menjadi awal dari anggapan dari masyarakat tersebut. Salah satunya, selama ini tidak ada yang bisa diperbuat oleh anggota DPRD perempuan yang

bisa betul-betul membawa aspirasi masyarakat terkhusus pada kaumnya. Selain itu, banyak masyarakat yang juga tidak paham apa yang dikerjakan anggota DPRD selama 5 tahun masa jabatannya tersebut. Artinya masyarakat menginginkan sebuah hasil kinerja yang dapat mereka lihat baik itu secara fisik maupun non fisik dari periode kerja DPRD selama 5 tahun.

Kebanyakan masyarakat juga tidak begitu percaya dengan perempuan sebagai wakilnya DPRD, sebagaimana anggapan masyarakat yang secara terang-terangan mengatakan bahwa perempuan tidak perlu masuk ke DPRD. Selain itu, kebanyakan calon perempuan juga hanya sebagai pelengkap semata untuk memenuhi kuota 30%.

b. Dualisme nilai dalam perpolitikan di Kabupaten Luwu Utara

Budaya patriarkhi yang telah menjamur memperngaruhi segenap pikiran mayoritas masyarakat, sehingga menganggap bahwa mereka tidak memerlukan perempuan untuk menjadi wakilnya di DPR. Mereka berfikir jika laki-laki saja belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik apalagi perempuan. Terlebih lagi agama dan seluruh tafsirnya disusun oleh laki-laki sehingga menambah pemikiran patriarkhi di lingkungan masyarakat dan membentuk sebuah budaya yang diciptakan secara sistematis dan massif selama berabad-abad. Maka jika wacana dominasi patriarkhi merupakan hasil kekuasaan dominan, cara membendungnya adalah dengan memunculkan wacana tandingan, melakukan dekonstruksi terhadap budaya yang diciptakan oleh masyarakat dan dilakukan melalui kesadaran kolektif masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh



pemerintah saat ini, yakni memunculkan regulasi yang mengharuskan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang publik.

Regulasi yang dibuat pemerintah ternyata belum cukup dalam menghapuskan pemikiran-pemikiran patriarki yang telah lama bersemayam di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya perempuan harus lebih cerdas dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat hari ini terkait dengan dirinya. Perempuan harus mampu menjawab tantangan zaman dan menunjukkan kualitas serta kuantitasnya di masyarakat.

c. Logika Dominasi dalam Perpolitikan di Kabupaten Luwu Utara

Dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat pada banyak kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan bisa disakiti. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan. Istilah terhadap kaum perempuan yang mengatakan bahwa perempuan hanya sebagai pemenuh kebutuhan dasar, sumur, dan dapur yang hanya mengurus seputar kebutuhan rumah tangga acap kali sering di dengar. Di satu sisi, biasanya laki-laki hadir sebagai kepala rumah tangga, pengambilan keputusan dan mencari nafkah atau bekerja diluar rumah. Pada sistem patriarki ini laki-laki memiliki kekuasaan untuk menentukan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Tentu saja budaya patriarki ini mempengaruhi kondisi hubungan perempuan dan laki-laki, yang pada umumnya memperlihatkan hubungan subordinasi, hubungan atas-bawah dengan dominasi laki-laki.

Dominasi laki-laki dianggap sebagai salah satu alasan mengapa keberadaan perempuan di ruang-ruang publik sangat terbatas. Untuk saat ini, hak-hak perempuan memang telah memiliki lirik yang cukup serius dari pemerintah. Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi-regulasi yang dapat menunjang perempuan untuk segera terlepas dari belenggu patriarki yang selalu menghantui. Hanya saja, beberapa kasus perempuan itu sendiri sadar atau tidak sadar telah menerima posisi marginalisasi yang di terimanya selama ini. Banyak yang kemudian masih merasa bersalah jika meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang hingga saat ini dijadikan perbandingan dominasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara salah satu caleg perempuan yang mengatakan:

“Tidak bisa dipungkiri kalau memang kaum perempuan di Luwu Utara sulit untuk bisa duduk di kursi DPR, karena dengan berbagai macam alasan, diantaranya adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada kaum perempuan dan terbatasnya dana untuk berkampanye, karena sudah menjadi rahasia umum kalau suara rakyat itu dibeli dengan rupiah. Sedangkan kebanyakan calon perempuan disetiap partai yang diusung rata-rata hanya sebagai pelengkap saja, jadi masyarakatpun enggan untuk memilih. Seperti saya, yang hanya jadi pelengkap karena pada waktu itu ada aturan harus ada calon mewakili perempuan dan kebetulan pada saat itu saya menjabat sebagai ketua BPD di desa saya dan saya berniat mau keluar karna ada usaha menjahit dipasar dan saya merasa terbebani jikalau makan gaji buta jadi jika saya mendaftar masuk calon dewan, otomatis saya harus mundur dari jabatan BPD. Meskipun keinginan untuk menjadi anggota dewan ada tapi tidak sepenuhnya kesitu, tujuan utama saya adalah keluar

dari jabatan BPD. Sehingga pada saat itu saya sama sekali tidak pernah melakukan kampanye-kampanye dalam bentuk apapun kecuali cetak stiker foto nama dan nomor urut karena partai yang buat kan”.

Ketidak siapan mental perempuan dalam melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan menjadi faktor yang membuat perempuan itu masih merasa tidak pantas untuk bersaing dengan laki-laki. Perempuan masih takut untuk melawan budaya patriarki yang membuat mereka berfikir bahwa menjadi perempuan memang memiliki tugas utama di ruang domestik dan laki-laki berada di ruang publik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa yang mempengaruhi kegagalan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 ada beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya Modal Politik, Modal Sosial, Modal Ekonomi, sedangkan faktor eksternalnya yakni metode kampanye, tim sukses, wajah baru caleg lainnya, dan perolehan suara partai dan individu. Selain itu, budaya patriarki yang masih sangat kental di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Luwu Utara menjadi penyumbang kegagalan perempuan pada pileg 2019. Jikalaupun selama dua periode Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang Bupati Perempuan, hal ini dikarenakan bantuan modal ekonomi yang kuat yang dimiliki oleh Bupati tersebut, sehingga pada kenyataannya budaya patriarki masih dilanggengkan masyarakat hingga saat ini. Selain persoalan itu, diketahui kebanyakan calon perempuan yang bertarung di pemilihan 2019 kemarin hanya sebagai pelengkap saja, meskipun demikian ada juga beberapa yang memang berniat untuk menjadi anggota DPR. Hal ini menjadikan eksistensi perempuan dalam pemilihan umum di Kabupaten Luwu Utara masih sangat kurang, karena rendahnya minat perempuan dalam dunia politik.

Pada tahun 2014 lalu, dua nama perempuan berhasil menduduki kursi parlemen. Namun, pada tahun 2019 kedua nama tersebut tidak lagi masuk daftar anggota dewan terpilih. Hal ini dikarenakan modal politik yang mulai berkurang,

diketahui salah satu perempuan yang lolos pada 2014 kemarin merupakan istri dari Bapak H Arifin Djunaedi yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati Luwu Utara. hal ini tentu saja membuat sebuah modal politik yang cukup besar untuk membawa kepada kemenangan. Sementara itu, masyarakat juga tentu saja menilai hasil kinerja dari para anggota DPR, khususnya perempuan. Hanya saja, mereka tidak dapat menunjukkan kualitas dan kuantitas yang dapat dijadikan sebagai modal untuk pertarungan selanjutnya sehingga membuat masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaan kepada mereka. Selain itu, perempuan juga dinilai tidak bisa mengoptimalkan modalitas dalam pemilihan legislatif. Banyak perempuan yang tidak berani mengeluarkan biaya kampanye yang begitu besar demi menarik calon pemilih, padahal yang bertarung bukan cuman puluhan melainkan ratusan orang. Sehingga membuat masyarakat lebih tertarik pada calon yang menawarkan hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Selain itu

Hal yang paling disayangkan, kebanyakan perempuan yang menjadi calon legislatif hanya sebagai pelengkap saja guna memenuhi kuota 30%. Mereka tidak diberi bekal untuk menjadi petarung karena kebanyakan dari mereka bukan dari kader partai politik yang telah lama mengabdikan diri di partai. Sehingga skill bertarung maupun pengalaman-pengalaman politik yang dimiliki tidak ada. Wajar, jika pada akhirnya masyarakat tidak menaruh percaya kepada perempuan untuk mewakili mereka di parlemen.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Peningkatan kepekaan politik untuk kaum perempuan agar tidak ada istilah pelengkap di daftar calon legislatif serta mampu memposisikan diri di masyarakat sehingga pandangan patriarkhi terhadap caleg perempuan perlahan bisa hilang di tengah masyarakat.
2. Perempuan harus berani keluar dari penjara sosial yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, menunjukkan kualitas serta kuantitas sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa tidak hanya laki-laki, perempuan juga memiliki kemampuan yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arsyad, Aisyah, *Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syariah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah Siri)*, Samata: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020

Ahmadi, Yahya, *Pandangan Masyarakat Pada Calon Naggota Legislatif (caleg) Perempuan PPP di Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) Kabupaten Gresik*, 2014.

Ariawa, Suka, *Pilihan Rational di Balik Pembebasan Corby*.

Budijatro, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fathy, Rusydan, *Modal Sosial: Konsep, inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2019

Hidayat, Muhtahir, *Strategi Politik Pemenangan Pasangan Kandidat Vonnie Annake Panambunan-Joppi Lengkong dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun*, 2018.

Herdiyanti, *Identifikasi Modal Sosial Masyarakat Terhadap Restorasi Lahan Pasca Tambang (Studi Masyarakat Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah)*, 2017.

<https://en.wikipedia.org> (online) diakses pada tanggal 2 April 2021 Jam 20.58

Hasanah, Najanah, *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, 2017.

KBBI Edisi Ke V

Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*

Qalbi, Nurul, *Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pasangan Muhammad Ramadhan Pomanto-Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013*, 2017.

Resita, Riris, *dalam skripsi Perempuan dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)*, 2019.

Sugiarto, Bowo, *Strategi kemenangan dalam pemilihan kepala daerah*, 2015.

Saeful, Pupu Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, 2009.

Ardina Wulantami, *Pilihan Rasional Keputusan Perempuan Sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga*, 2018.

#### **Sumber Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Ibu Ahsana Riska Caleg DPRD Kab Luwu Utara 2019

Dapil 4 pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 20.30 Wita.

Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Nurjati Lallo Matarru Caleg DPRD Kab Luwu

Utara 2019 Dapil 1 pada tanggal 9 April 2021 pukul 19.19 Wita

Hasil wawancara dengan Ibu Harnia Djafar Caleg DPRD Kab Luwu Utara 2019

Dapil 1 pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 16.30 Wita.

Hasil Wawancara dengan Ibu Nirwana Andi Gazaling Caleg DPRD Kab Luwu

Utara Dapil 2 pada tanggal 12 April pukul 15.30 Wita.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rafika Said Caleg DPRD Kab Luwu Utara Dapil 4

pada tanggal 12 April pukul 10.00 Wita.



Hasil wawancara dengan Ibu Endang Sri Hartati Caleg Dprd Kab Luwu Utara

Dapil 1 pada tanggal 21 Januari pukul 10.00 Wita.

Hasil Wawancara dengan teman – teman perwakilan kaum millennial pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 20.30 Wita.

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Dapil 1-4 pada tanggal 10-15 Februari pukul 16.00 Wita.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 20.00 Wita.



L

A

M

P

I



R

A

N

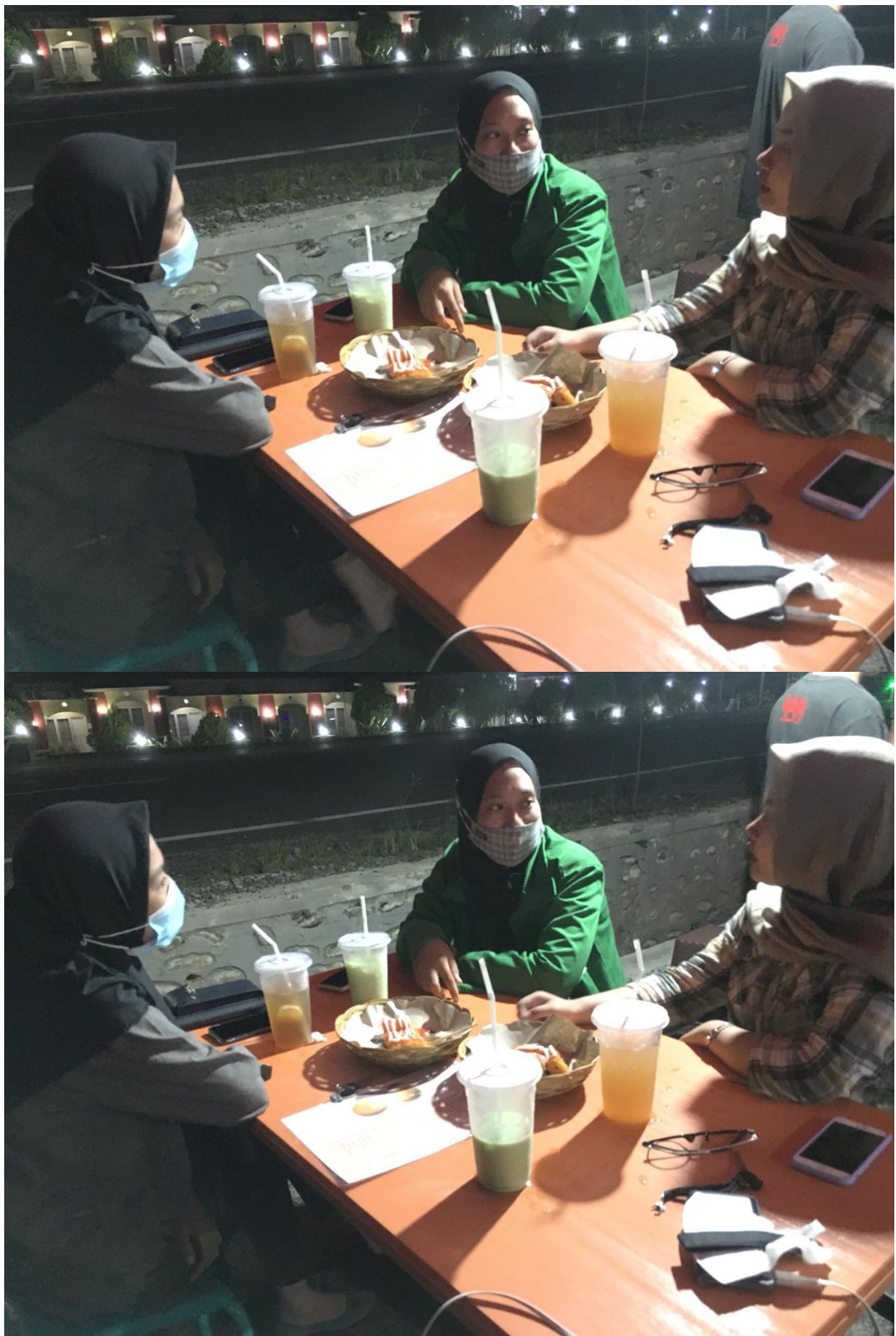




KEPERI  
DIN  
A R

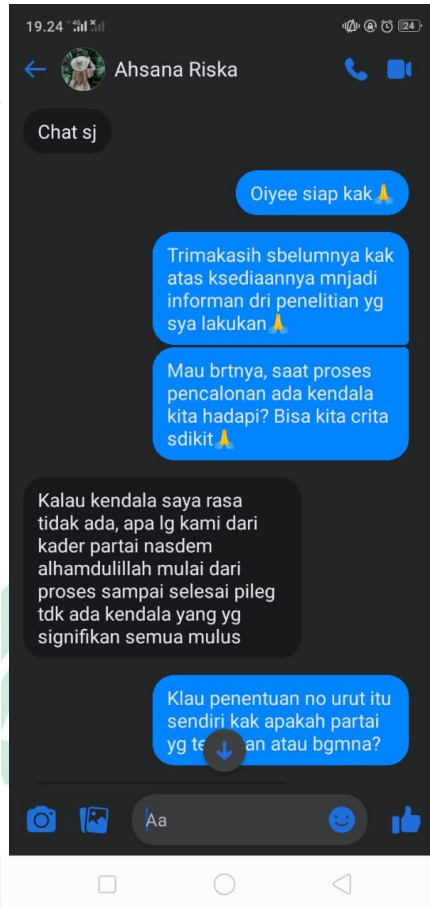
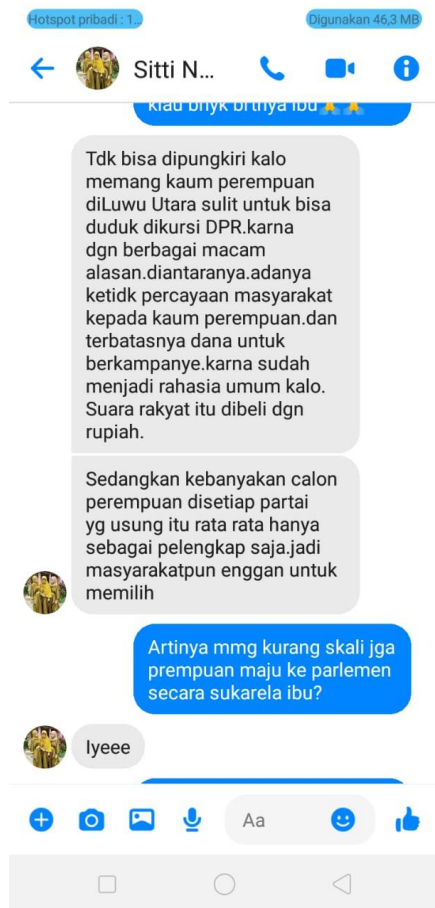












UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR



## BIODATA PENULIS



Hatira lahir di Masamba pada tanggal 29 Agustus 1999 yang merupakan anak dari Bapak Sarimuddin dan Ibu Mariani. Anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis telah berhasil menyelesaikan Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar tepatnya di SDN 094 Laba di Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan Pendidikan di MP Negeri 1 Masamba dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba dan selesai pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2017, dan mengambil jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Program Strata Satu (S1). Penulis juga aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus. Organisasi Intra kampus yaitu HMJ ILMU POLITIK UIN. Sedangkan organisasi ekstra kampus yang penulis pernah ikuti yaitu PLC (Pemilar Learning Center), IPMIL (Organisasi Kedaerahan), serta HmI (Himpunan Mahasiswa Islam).